

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR YANG  
BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN  
KAWASAN PESISIR DANAU TEMPE DI  
KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO**

**SKRIPSI**

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN  
NIM 4517042009**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2023**

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
PESISIR YANG BERKELANJUTAN BAGI  
PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR  
DI DANAU TEMPE KECAMATAN TEMPE  
KABUPATEN WAJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T)

Oleh

**MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN  
NIM 45 17 042 009**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR YANG BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DANAU TEMPE DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN**

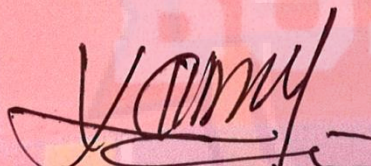
**NIM 45 17 042 009**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi


Pada Tanggal 24 Februari 2023

Menyetujui :

Pembimbing I

  
**Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T**  
**NIDN : 09-110774-01**

Pembimbing II


  
**Jufriadi. ST., MSP**  
**NIDN 09-310168-02**

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Teknik

  
**Dr. H. Nasrullah, S.T, M,T**  
**NIDN : 09-090773-01**

Ketua Program Studi  
Perencanaan Wilayah dan Kota

  
**Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M,T**  
**NIDN : 09-110774-01**



## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.081a/SK/FT/UNIBOS/II/2023 Pada Tanggal 24 Februari 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Februari 2023

Skripsi Atas Nama : Muhammad Iqbal Awaluddin

Nomor Pokok : 4517042009

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

### TIM PENGUJI

Ketua : Dr.S Kamran Aksa, ST.,MT

Sekretaris : Jufriadi ST.,M.SP

Anggota : 1. Dr.Rudi Latief,ST.,M.Si

2. Rimba Arief, ST.,M.Sc




.....  
.....  
.....  
.....

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. H. Nasrullah, ST., MT.  
NIDN : 0908077301

KETUA PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.  
NIDN : 0911077401

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN  
NIM : 45 17 042 009  
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, .....2023

Yang menyatakan,



**MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN**

## ABSTRAK

***Muhammad Iqbal Awaluddin, 2023 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Danau Tempe Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Dibimbing Oleh S. Kamran Aksa dan Jufriadi.***

Kabupaten Wajo merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya pesisir yang sangat besar,. Salah satu kawasan pesisir di Kabupaten Wajo yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang banyak yaitu Kecamatan Tempe. Potensi sumber daya pesisir Kecamatan Tempe adalah hasil produksi perikanan. Potensi sumber daya lain yang dapat dikembangkan adalah pengembangan pariwisata. Dari potensi tersebut maka diperlukan upaya pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sumber daya pesisir dan menentukan program pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pesisir di Kecamatan Tempe. Pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan ditetapkan berdasarkan hasil dari analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa wilayah pesisir di Kecamatan Tempe yang memiliki tingkat perkembangan kondisi potensi sumber daya pesisir tertinggi terletak pada di Kelurahan Tempe yang potensi pengembangannya adalah pariwisata dan Perikanan, kemudian tingkat perkembangan yang sedang terletak pada Desa Mattirotappareng Dan Kelurahan Salomenraleng dengan potensi pengembangan Perikanan dan Pertanian. Dan tingkat perkembangan yang rendah terletak pada Desa Kelurahan Laelo dengan potensi sumber daya pesisir yang bisa ditingkatkan adalah Pertanian, dari hasil tersebut maka diperlukan beberapa upaya peningkatan potensi, diantaranya adalah menyiapkan lahan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, melakukan proses pelestarian dan pemeliharaan ekosistem pesisir, pengelolaan dan pengembangan sumber daya pesisir yang benar secara berkelanjutan, agar menumbuhkan perekonomian masyarakat, sumber daya pesisir juga tidak tereksplorasi secara massal dan tidak mengakibatkan dampak buruk dikemudian hari.

***Kata Kunci: Potensi, Pengembangan, Pengelolaan Sumber daya Pesisir.***

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Tunggal, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Danau Tempe Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo”** penelitian ini berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir dan strategi pengembangan potensi kawasan pesisir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Symasuriani SP** dan Ayahanda **Awaluddin Sibe SKM.,M.Kes** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak **Prof. Dr. Batara Surya S.T.,M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr.H. Nasrullah, S,T,M,T** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, ST.,** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak **Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT** selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Jufriadi, ST, MSP** selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.



7. Bapak **Jufriadi, ST, MSP** selaku Penasihat Akademik yang sedia memberikan arahan akademik kepada penulis
8. Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah Dan Kota **Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar** yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sejak awal sampai selesai.
9. Pihak Instansi pemerintah Kecamatan Tempe yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. **Siti Khofifah Pratiwi** yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini.
11. Kepada Saudara/I, **Apris Sural Jayardi, Desfar Ramdan** yang telah bersedia menemani penulis dikesehariannya dan memberikan dukungan serta motivasi.
12. Kepada seluruh teman, sahabat dan saudara-saudaraku seperjuangan **PWK 2017 (GRID17)**, yang selalu memberikan kritik dan dukungan serta memberikan cerita baru dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan pikiran dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

*Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Januari 2023

Penulis

**MUHAMMAD IQBAL AWALUDDIN**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Wilayah Pesisir .....	13
B. Karakteristik Wilayah Pesisir .....	14
C. Pengertian Pengembangan Wilayah Pesisir .....	15
D. Pendekatan Dalam Wilayah Pesisir .....	20
E. Potensi Sumber Daya Pesisir .....	23
F. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir .....	25
G. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Dan Terpadu .....	33
1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan.....	33
2. Pengelolaan Pesisir Terpadu .....	33
3. Isu-Isu Sumberdaya Pesisir.....	37
4. Tujuan Pengembangan Wilayah Pesisir .....	41
5. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir .....	44
6. Prinsip Dasar (Asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	45
7. Penyusunan Rencana Strategi Dan Arahana Pengelolaan....	46
H. Tabel Penelitian Terdahulu.....	48

I. Kerangka Pikir .....	52
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi dan waktu Penelitian .....	53
C. Teknik Pengumpulan Data .....	54
D. Jenis Dan Sumber Data .....	55
E. Variabel Penelitian.....	57
F. Definisi Operasional .....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	66
1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo.....	66
B. Kondisi Fisik Wilayah.....	68
a. Topografi.....	68
b. Kemiringan Lereng.....	69
c. Kondisi tanah .....	70
d. DAS (Daerah Aliran Sungai) .....	71
e. Penggunaan Lahan.....	72
C. Gambaran Umum Lokasi.....	73
a) Profil Lokasi Penelitian .....	74
b) Aspek Kependudukna .....	75
c) Kondisi Fisik Lokasi.....	76
D. Kondisi Aktifitas Masyarakat.....	103
E. Adaptasi Masyarakat di Kawasan Danau Tempe Terkait Penggunaan Lahan Pada Pergantian Musim.....	107
F. Analisis Pembobotan .....	120
G. Analisis SWOT.....	142
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>158</b>
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>160</b>



## DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	48
3.1	Variabel Penelitian.....	57
3.2	Model Matriks Analisis SWOT .....	59
4.1	Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2021 .....	63
4.2	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2021 .....	72
4.3	Luas Wilayah Lokasi Penelitian.....	73
4.4	Distribusi Kepadatan Penduduk.....	74
4.5	Perkembangan jumlah Penduduk Di Lokasi Penelitian.....	75
4.6	Ketinggian Dan Luas Ketinggian di Lokasi Penelitian .....	77
4.7	Kemiringan Lereng Dan Luasan di lokasi Penelitian .....	78
4.8	Curah Hujan Dan Luas di Lokasi Penelitian.....	79
4.9	Klasifikasi Jenis tanah Dan Luasan Di lokasi Penelitian.....	80
4.10	Penggunaan Lahan Di lokasi penelitian .....	81
4.11	Luas Areal Tanam Dan Luas Areal Panen .....	105
4.12	Nilai Bobot Masing-Masing Indikator Faktor Gaya Sentrifugal .....	138
4.13	Nilai Bobot Masing-Masing Indikator Faktor Gaya Sentripetal .....	139
4.14	Nilai Tertimbang Masing-Masing Indikator Faktor Gaya Sentrifugal .....	140
4.15	Nilai Tertimbang Masing-Masing Indikator Faktor Gaya Sentripetal .....	141
4.16	Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS).....	146
4.17	Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS) .....	148
4.18	Matriks Analisis SWOT Penggunaan Lahan di Kawasan Danau Tempe	149

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Hubungan Antara Wilayah Pesisir Dan Sistem Sumber Daya Pesisir .....	24
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo.....	67
4.2 Peta Topografi Kabupaten Wajo .....	68
4.3 Peta Kemiringan lereng Kabupaten wajo .....	69
4.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo.....	70
4.5 Peta Lokasi Penelitian .....	82
4.6 Peta Topografi Lokasi.....	83
4.7 Peta Kemiringan Lereng Lokasi.....	84
4.8 Peta Jenis Tanah Lokasi .....	85
4.9 Peta Curah Hujan .....	86
4.10 Peta Penggunaan Lahan .....	87
4.11 Teknik Bermukim.....	112
4.12 Ketinggian Banjir Pada Musim Hujan.....	113
4.13 Adaptasi Masyarakat dengan Membuat Jembatan Penyeberangan .....	113
4.14 Dekomentasi Bersama Ambo Dalle Nelayan Sekitar Danau Tempe .....	117
4.15 Peta Tapak .....	104
4.16 Peta Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah pesisir laut, pulau-pulau kecil dan Danau memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati (Adrianto, 2015). Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir untuk pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain juga memberikan tekanan ekologis dan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. (Rahmawati, 2004).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut dan danau yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut dan danau tersebut belum dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut dan danau selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal.

Dalam konteks ilmiah inilah upaya pemanfaatan laut dan danau Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut dan danau yang bagaimana ?, Seharusnya adalah pemanfaatan laut dan danau yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumber daya tersebut sangat diperlukan karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat (Lippitt et. al., 2002)

Adapun dengan berkembangnya globalisasi industri dan perdagangan bebas, telah menyebabkan semakin meningkatnya pemanfaatan dan pemberdayagunaan wilayah pesisir, yang diiringi dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir.

Berbagai aktifitas pembangunan di wilayah pesisir, seperti permukiman, industri dan perdagangan, kegiatan transportasi maupun pariwisata, secara signifikan memang telah memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan. Namun perkembangan ini juga turut memberikan dampak terhadap kelestarian dan daya dukung lingkungan maupun perubahan-perubahan terhadap kondisi sosial di wilayah ini yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.



Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya di daratan, lautan dan di udara perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kemampuan lingkungan sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Khusus untuk ruang laut dan udara akan diatur dengan aturan lain.

Karena belum adanya aturan yang jelas mengenai pemanfaatan wilayah Danau maka untuk itu telah ditetapkan pedoman umum penyusunan rencana tata ruang khususnya pengelolaan pesisir sehingga dikeluarkan Kepmen No. 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang selanjutnya mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), akhirnya menuntut praktek pengelolaan yang tepat di tingkat daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstraksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstraksi dimaksud secara langsung mengurangi kualitas tatanan itu dari

ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompensasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya pesisir yang tersedia menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah di daerah tersebut.

Pembangunan di wilayah pesisir dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber- sumber pertumbuhan yang baru (Jufriadi, 2014).

Sulawesi selatan merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia dengan panjang pantai 1.973 km dan luas perairan lautnya kurang lebih 48.000 km<sup>2</sup>, memiliki potensi yang sangat kaya akan berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memilah dan mencari makan berbagai biota laut.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya perairan daratan yaitu Danau Tempe. Danau

Tempe merupakan salah satu danau yang mempunyai potensi yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif terletak dalam 3 wilayah administratif kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Besarnya potensi tersebut menjadi modal utama dalam sistem ekonomi masyarakat setempat, terutama terhadap masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari keberadaan danau. Ditinjau dari segi sosial budaya, danau Tempe merupakan kebanggaan masyarakat di sekitarnya.

Potensi sumber daya pesisir yang ada sekarang dapat dipertahankan dan dikembangkan seperti hasil produksi perikanan yang hingga saat ini semakin meningkat dan adapun yang tahun ke tahun menurun, seperti jenis ikan pada tahun 2018 per tonnya 8,79 sedangkan pada tahun 2019 per tonnya 7,35, terlihat hasil produksinya sangat menurun. Adapun jenis ikan lain yang dari tahun ke tahun meningkat yaitu jenis ikan mas pada tahun 2018 per tonnya 18,85 sedangkan pada tahun 2020 per tonnya 22,70 (Buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Wajo Tahun 2021). Kegiatan lain yang dapat dikembangkan adalah pengembangan pariwisata.

Inisiatif pengelolaan Kawasan Pesisir Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo membutuhkan respon positif dari setiap aktor utama di setiap lokalitas. Respon yang dimaksud tidak hanya menyangkut kesiapan menerima inisiatif ini tetap kesiapan konstitusional di tingkat lokal,

kesiapan masyarakat yang diturunkan dalam bentuk kesiapan aksi bersama dalam hal ini kesiapan di tingkat komunitas atau masyarakat pesisir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Tantangan ini semakin nyata di kawasan pesisir, dimana dituntut keterpaduan pengelolaan untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo pada umumnya, maka di masa yang akan datang menjadi tantangan bagi kawasan tersebut untuk merebut peluang potensi yang ada, sehingga perencanaan penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diarahkan secara terpadu guna mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh. Sesuai dengan itu, maka diperlukan arahan penataan ruang untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam pesisir Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Tempe.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang melatar belakangi penelitian dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Danau Tempe Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo” yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

“Bagaimana strategi pengembangan kawasan pesisir Danau Tempe dengan pengelolaan berkelanjutan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan sumber daya pesisir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

### **2. Manfaat**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha pesisir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

## **D. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian kali ini difokuskan pada pengelolaan sumber daya pesisir di kawasan pesisir Danau Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Adapun lingkup pembahasan

materinya yaitu identifikasi sumber daya pesisir dan mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menguraikan rangkaian penyusunan penulisan pada penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui bagian-bagian penulisan. Adapun sistematika pembahasan.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini memuat literatur yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penulisan yang selanjutnya digunakan dalam melakukan analisa-analisa pembahasan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

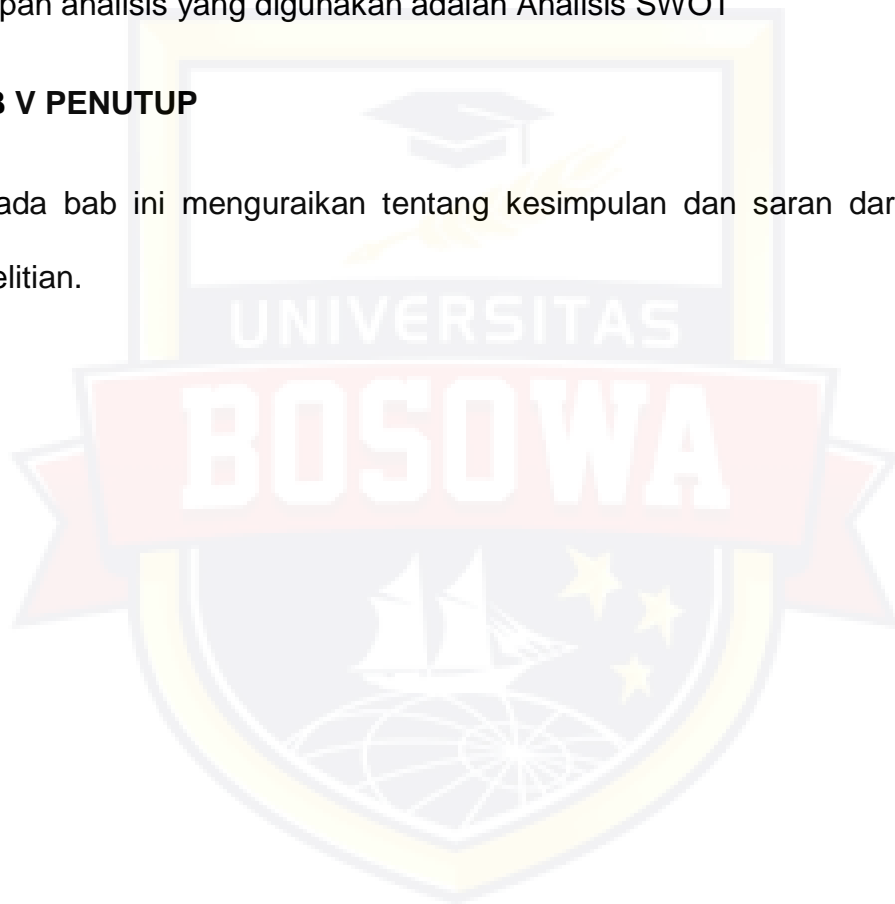
Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, variable penelitian, dan definisi operasional.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Takalar dan Kecamatan Galesong sebagai wilayah penelitian, tahapan analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengembangan wilayah adalah upaya pemanfaatan sumber daya wilayah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya wilayah memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Pengembangan wilayah yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif akan berakibat pada menurunnya kemampuan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, yang pada akhirnya sangat merugikan sistem wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, sumber daya wilayah senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (Lutfi Muta'ali, 2012).

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan lapangan kerja. Karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang sudah ada dan sumber-sumber pertumbuhan baru. Sumber daya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan

dapat dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional (Jufriadi, 2014).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) menjelaskan bahwa prinsip utama pengelolaan sumber daya alam menurut perspektif kemandirian lokal adalah ekstraksi sumber daya pada suatu wilayah tidak boleh mengurangi tingkat kualitas tatanannya. Oleh karena itu ekstraksi dimaksud secara langsung mengurangi kualitas tatanan itu dari ketersediaan sumber daya untuk mendukung pengembangan tatanan dimasa yang akan datang, maka ekstraksi tersebut harus dikompensasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

Akses untuk memperoleh manfaat dari sumber daya jika tidak diatur dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak terhadap kelestarian dan keberlanjutan akan menimbulkan dampak eksploitasi terhadap sumber daya. Dalam beberapa kasus, sumber daya pesisir seringkali mendapat beban yang sangat berat, selain karena posisinya yang berada didaerah hilir, juga struktur wilayahnya yang sangat terbuka dan selama ini tidak mendapat prioritas pembangunan akibat paradigma pembangunan yang sangat sektoral.(Bengen, 2009).

## **A. Pengertian Wilayah Pesisir**

Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz 1972; Soegiarto 1976 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil, 2003). Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perairan pesisir dan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna (Beatly 1994 dalam Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau Kecil 2003). Menurut (Dahuri et al. 1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan dimana ke arah darat adalah jarak secara arbiter dan rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yuridiksi wilayah propinsi atau state di suatu Negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah

peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Menurut (Dahuri et al. 1996), dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan lain-lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan massa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan massa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh (Ghofar, 2004), dinyatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient.



## **B. Karakteristik Wilayah Pesisir**

Merupakan wilayah campuran antara laut, darat, dan udara, bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur tersebut. Hal ini terlihat dari adanya gradasi butiran sedimen sebagai hasil pengikisan batuan padat dan keras oleh unsur alam. Wilayah pesisir berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) dan merupakan habitat dari berbagai jenis burung migran, serta habitat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut.

(natural coastal defence) Terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa (goods and service) bagi komunitas pesisir dan pemanfaat lain (beneficiaries) Adanya kompetisi antara berbagai kepentingan Sebagai backbone dari kegiatan ekonomi nasional Merupakan wilayah strategis, didasarkan atas fakta:Garis pantai Indonesia 81.000 km pada 17.508 pulau (terbanyak di dunia),Penyebaran penduduk terbesar (cikal bakal urbanisasi), Potensi sumber daya kelautan yang kaya (biodiversity, pertambangan, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dsb), Sumber daya masa depan (future resources) akibat ketersediaan wilayah darat yang semakin terbatas,Wilayah hankam (perbatasan).

### **C. Pengembangan Wilayah Pesisir**

Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkotaan sebagai intinya, bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (output) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir juga dapat berupa wilayah yang relatif kecil kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh ekologis sehingga melewati batas-batas satuan wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan).

Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak menutup kemungkinan

adalah lintas batas administratif (Budiharsono, 2001) Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh nilai lokasi (locational rent), setidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni: ricardian rent, environmental rent, dan social rent. Ricardian rent adalah nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Environmental rent kawasan-kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi- fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Dalam mekanisme pasar umumnya, hanya locational dan ricardian rent yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) basis ekonomi wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaru, (2)

memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) efek ganda yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumber daya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian dan (5) terjadinya secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan (Rustiadi et al. 2004)

Berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat (Dahuri et al. 2001) yaitu: (1) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologis paling produktif di dunia; berbagai ekosistem dengan produktifitas hayati tertinggi, seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan estuaria, berada di wilayah pesisir, lebih dari 90% total produksi perikanan dunia (sekitar 82 juta ton) baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya, berasal dari wilayah pesisir, (2) wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan yang paling praktis dan relatif lebih murah bagi kegiatan industri, permukiman, dan kegiatan

pembangunan lainnya, daripada yang dapat disediakan oleh daerah lahan atas, kemudahan tersebut berupa media transportasi, tempat pembuangan limbah, bahan baku air pendingin dari air laut untuk berbagai jenis pabrik dan pembangkit tenaga listrik, dan bahan baku industri lainnya; (3) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan menguntungkan, seperti pasir putih atau pasir bersih untuk berjemur, perairan pesisir untuk renang, selancar, dan berperahu, dan terumbu karang serta keindahan bawah laut untuk pariwisata selam dan snorkeling.

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antar daerah/regional. Tujuan pembangunan wilayah juga harus mampu mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antar sektor pertanian dan industri

melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (Todaro, 2000). Di samping itu pembangunan wilayah bertujuan untuk menciptakan berbagai alternatif yang lebih baik bagi setiap anggota masyarakat guna mencapai aspirasinya. Penciptaan alternatif tersebut dicirikan oleh adanya proses transformasi ekonomi dan struktural melalui peningkatan kapasitas

produksi dan produktivitas rata-rata tenaga kerja, peningkatan pendapatan, memperkecil disparitas pendapatan, perubahan struktural distribusi kekuasaan antar golongan masyarakat ke arah yang lebih adil, serta transformasi kultural dan tata nilai. Perubahan yang terjadi diharapkan lebih mengarah kepada perbaikan mutu hidup dan kehidupan masyarakat (Nasoetion, 1999).

Pengelolaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat memberikan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik berdampak buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut di dalam suatu wilayah untuk dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam. Tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir adalah, (1) pendayagunaan potensi pesisir dan lautan, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pengelolaan dan pengembangan pesisir dan dapat bermanfaat bagi perekonomian daerah, (2) adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan ekosistem wilayah pesisir dalam mendukung kelestarian sumber daya pesisirnya dan lautan khususnya. Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di wilayah pesisir untuk

bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

#### **D. Pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir**

Banyak yang berpendapat bahwa pengelolaan wilayah pantai secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management) merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Keterpaduan di dalam manajemen publik dapat didefinisikan sebagai penentuan goals dan objektif secara simultan, melakukan secara bersama-sama pengumpulan informasi, perencanaan dan analisis secara kolektif, penggunaan secara bersama-sama perangkat/ instrumen pengelolaan. Pada kenyataannya, integrasi yang bersifat ideal sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah akandapat terjadi atau dilakukan. Di dalam praktek integritasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, prioritas dan tindakan. Usaha untuk melakukan koordinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur dan rencana. Dengan demikian, rencana wilayah pantai terpadu disamping berfungsi sebagai arahan bagi pengembangan, strategi yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan, juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi.

Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung



dari kondisi wilayah pesisir bersangkutan. Pendekatan-pendekatan ini meliputi : (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan fungsional/ ekonomi; (3) pendekatan sosio- politik; (4) pendekatan behavioral dan kultural. Pendekatan ekologis menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengkaji dampak suatu pembangunan secara ekologis, akan tetapi kecenderungan mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis dan politis dari ruang wilayah. Pendekatan fungsional ekonomi, menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional berbagai kegiatan, dimana faktor jarak atau lokasi menjadi penting. Pendekatan sosial politis, menekankan pada aspek “penguasaan” wilayah. Pendekatan ini melihat wilayah tidak saja dilihat dari berbagai sarana produksi namun juga sebagai sarana untuk mengakumulasikan power. Konflik- konflik yang terjadi dilihat sebagai konflik yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini juga melihat wilayah sebagai teritorial, yakni mengaitkan ruang-ruang bagian wilayah tertentu dengan satuan-satuan organisasi tertentu. Pendekatan behavioral dan kultural, menekankan pada keterkaitan antara wilayah dengan manusia dan masyarakat yang menghuni atau memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia dan masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pendekatan ini melihat aspek- aspek norma, kultur, psikologi masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konsepsi wilayah yang berbeda.

Disamping pendekatan-pendekatan yang bersifat substansial seperti diatas, terdapat beberapa pendekatan yang bersifat instrumental. Pendekatan instrumental ini dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu (1) instrumen hukum dan peraturan; (2) instrumen ekonomi; (3) instrumen program dan proyek; dan (4) instrumen alternatif.

Instrumen hukum dan peraturan mempunyai konsep atau ide dasar adanya hukum dan peraturan beserta penegakannya. Instrumen ini antara lain berupa hukum dan peraturan-peraturan seperti ijin lokasi, ijin bangunan, AMDAL dan sebagainya. Instrumen ekonomi mempunyai konsep atau ide dasar adanya pengaruh ekonomi pasar yang sangat signifikan terhadap pengembangan wilayah. Contoh dari penerapan instrumen ini adalah adanya penerapan pajak, retribusi serta insentif dan disinsentif yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Instrumen program dan proyek khususnya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah didasari atas konsep atau ide dasar pada kebutuhan-kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat luas. Penerapan instrumen ini seperti pembangunansarana dan prasarana wilayah dan sejenisnya. Instrumen alternatif berdasarkan konsep atau ide dasar adanya pemberdayaan masyarakat dari kemitraan. Contoh- contoh dari penerapan instrumen ini antara lain meliputi pelatihan, pendidikan, partisipasi masyarakat, adanya proyek-proyek percontohan, penghargaan kepada pelaku masyarakat dan swasta atau pelaku pembangunan lainnya.

## **E. Potensi Sumber daya Pesisir**

Kawasan pesisir di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat pulih (renewable) maupun yang tidak dapat pulih (unrenewable). Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta didukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pengembangan wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (Interface) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir (Dahuri et al 2001), potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompokyakni (1) Sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources), (2) Sumberdaya tidak dapat pulih (unrenewable resources), (3) Energi lautan dan (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (environmental services). Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut

(marine culture). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumber daya energi terdiri dari OTEC (ocean thermal energy conversion), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

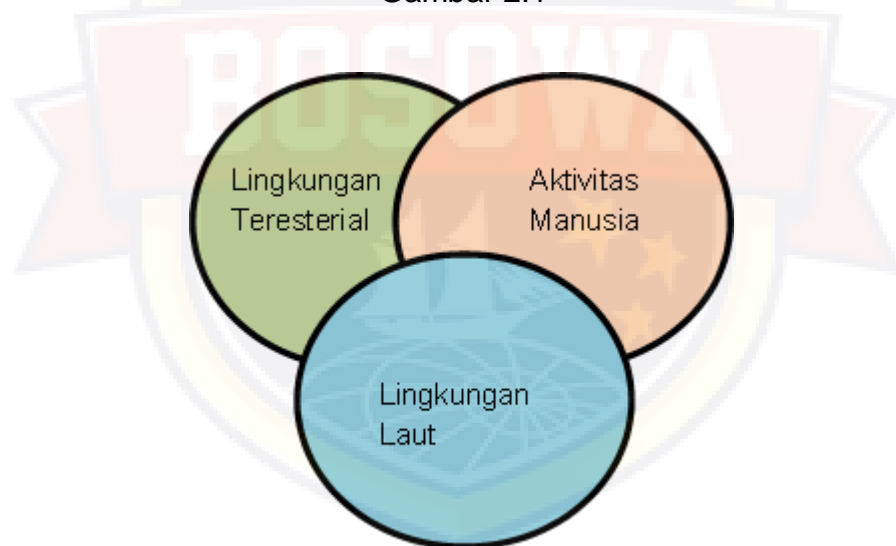
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan kabupaten kota untuk mengelola sumberdaya wilayah laut sepertiga dari kewenangan provinsi 12 (dua belas) mil yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menjelaskan secara tegas tentang pengertian sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil yakni sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut,tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

## **F. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber daya**

### **Pesisir**

Secara geografis wilayah pesisir terbentuk dari pertemuan antara daratan dan lautan dimana di dalamnya terjadi proses-proses fisik dan biologi yang kompleks. Secara ekologis wilayah pesisir terdiri atas sejumlah habitat daratan dan perairan yang rentan, dengan ekosistem pesisir yang unik, yang memiliki sumberdaya alam yang berharga. Ekosistem ini juga sangat terkait dengan sistem sosial ekonomi yang membentuk sistem sumber daya (Scura, 1992).

Gambar 2.1



Hubungan antara Wilayah Pesisir dan Sistem Sumber Daya Pesisir (Scura,1992).

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sistem sumberdaya dapat dikonseptualisasikan sebagai cakupan interaksi antara biofisik, lingkungan teresterial dan laut serta aktifitas manusia, termasuk lembaga pemerintah

dan lembaga-lembaga perencana. Daerah arsiran pada gambaran menunjukkan wilayah pesisir sedangkan daerah bayangan merupakan sistem sumberdaya pesisir. Dengan demikian segenap aktifitas manusia yang dipahami sebagai kegiatan pembangunan ekonomi, merupakan suatu elemen penting dan telah turut memberikan kontribusi di dalam suatu sistem sumber daya dalam hal ini yang terdapat di wilayah pesisir.

Pembangunan adalah suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan- pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia (Bryant dan White, 1982). Istilah “pembangunan” sering di sama artikan dengan “pengembangan” yang dalam bahasa asing juga dapat diistilahkan dengan development.

(Djojohadikusumo, 1994) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi (development) mengandung arti yang lebih luas dibanding pengertian pada pertumbuhan ekonomi (growth). Pembangunan ekonomi mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

(Nasoetion, 1992) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan keadaan dimana terdida lebih banyak alternative yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai

aspirasinya yang paling humanistic yaitu tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Selanjutnya (Winoto, 1995) mengemukakan bahwa setiap proses pembangunan senantiasa diikuti oleh proses transformasi perekonomian, ketenaga kerjaan, demografi sosial dan budaya masyarakat, wilayah atau negara. Sedangkan ciri proses pembangunan menurut (Djojohadikusumo, 1994) adalah peningkatan produksi, perubahan komposisi produksi, perubahan pola alokasi sumberdaya produksi, perubahan dalam pola distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal yang penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan dimana terjadinya proses transformasi dan perubahan struktural selama ini selalu menempatkan dimensi ekonomi sebagai pertimbangan yang dominan. Sebaliknya, walaupun sudah masuk perhitungan, faktor lingkungan masih dianggap sebagai pengambat pembangunan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pembangunan dan lingkungan adalah dua hal yang saling berlawanan. Sehingga dalam perkembangannya dalam mengatasi permasalahan ini, pola pembangunan berkelanjutan telah semakin banyak diterima sebagai koreksi terhadap pola pembangunan yang konvensional tersebut (Salim, 1991). Semakin banyak orang merasa pola pembangunan yang konvensional yang hanya



mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja telah melampaui batas kegunaannya dan bahkan sekarang menjurus ke arah yang merugikan manusia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya alam pesisir yang besar dan masih terdapat yang belum dimanfaatkan (underutilized). Pesatnya pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumberdaya pesisir akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Namun ironisnya kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir umumnya masih termasuk kategori miskin. Fenomena ini hanya dapat diselesaikan dengan jalan membangun wilayah pesisir dan lautan secara optimal, sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sekaligus dapat meningkat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan kata lain, pembangunan wilayah pesisir dilakukan tanpa meninggalkan pertimbangan terhadap keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar (human specific). Keadaan ini telah mendorong kita akan kebutuhan untuk konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Dahuri, 1998).

Keberlanjutan (sustainability) merupakan suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang

tanpa harus pulamengorbankan peluang generasi sekarang untuk tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang (WCED, 1987). Dengan demikian pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada di dalamnya. (Dahuri, 1996) menjelaskan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai strategi pemanfaatan ekosistem alamiah rupa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia tidak rusak.

Secara ekologis terhadap tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) keharmonisan spasial (special suitability), (2) kapasitas asimilasi (assimilative capacity), dan (3) pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, tidak seluruhnya diperuntukan bagi zona pemanfaatan, yang sangat penting dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan unsur hara, membersihkan limbah secara alamiah maupun sebagai sumber keanekaragaman hayati. Selanjutnya setiap aktifitas pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai (Dahuri et al, 1996).

Pola pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, namun juga mengembangkan keberlanjutan sosial (social sustainability) yang berkaitan erat dengan ketahanan sosial (social resilience). Dalam masyarakat terdapat ambang batas sosial, di atas ambang tersebut maka masyarakat meletup. Hal ini bisa terjadi apabila proses pembangunan tidak memberi peluang bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pembangunan, sehingga tertutup kesempatan Meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan Meningkatkan kualitas diri melalui perbaikan kesehatan, kesempatan pendidikan, kesempatan yang terbuka (ready access) memperoleh sumberdaya seperti tanah, lapangan kerja, modal, kredit, pendapatan dan yang serupa (Salim, 1991). Dari pengalaman yang diperoleh, letupan sosial terjadi apabila hasil pembangunan terbagi timpang sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Dalam perkembangan ambang batas sosial atau yang lebih sering dikatakan sebagai daya tampung sosial (social Carrying Capability) menurut (Hadi, 1998) dikatakan sebagai kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat secara harmonis. Daya tampung sosial ini dapat diukur melalui beberapa indikator baik secara kualitatif maupun kuantitatif, antara lain seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kuantitas penduduk, kohesi sosial, peran serta atau keterlibatan masyarakat dan sebagainya.

Selanjutnya sebagai suatu konsep, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang sangat sederhana tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Untuk mewujudkan konsep ini dalam realitas kehidupan dibutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar mengenai cara-cara kita melakukan pembangunan, hidup berkonsumsi dan saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bernegara serta cara-cara kita saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama serta memanfaatkan sumber daya yang memiliki (Steven dalam Winoto, 1998).

(Dahuri et al, 1996) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan asas pemanfaatan yang optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif, seperti terjadinya penurunan nilai-nilai sumberdaya pesisir dan lautan yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu sendiri. Keadaan ini disebabkan antara lain penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kemampuan daya dukungnya, tidak disertainya dengan usaha-usaha konservasi pembangunan yang telah direncanakan penataannya.

Berdasarkan karakteristiknya, potensi dan permasalahan yang ada, maka untuk mencapai pemanfaatan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan telah mendorong untuk dilakukannya pengelolaan wilayah

pesisir secara terpadu. Menurut (Olsen et al, 1997) maupun (Cicin-Sain dan Knecht 1998) secara umum pengelolaan pesisir terpadu dapat didefinisikan sebagai suatu proses dinamis dan terus menerus memadukan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, kepentingan publik dan sektoral dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk pembangunan dan perlindungan ekosistem dan sumber daya pesisir. Sedangkan tujuan dari pengelolaan pesisir terpadu sebagaimana dinyatakan (Burbridge, 1997) adalah untuk memperbaiki kualitas hidup komunitas manusia yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya pesisir disamping memelihara keanekaragaman biologi dan produktivitas ekosistem pesisir. Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelas lagi (Cicin-Sain dan Knecht, 1998) juga mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan, mengurangi kerentanan wilayah pesisir dan masyarakatnya dari bahaya alami, dan untuk menjaga proses-proses ekologis esensial, sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman biologis di wilayah pesisir.

## **G. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber daya Pesisir yang Berkelanjutan dan Terpadu**

### **1. Pengelolaan Pesisir Secara Berkelanjutan**

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (demokratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

### **2. Pengelolaan Pesisir Terpadu**

Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (integrated coastal zone management). Pilihan ini didasarkan pada: (1)

wilayah pesisir merupakan multiple use zone dimana terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan serta terdapat lebih dari dua macam pemanfaatan kawasan pesisir; (2) karakteristik dan dinamika alamiah the nature sumber daya pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas; (3) wilayah pesisir dihuni lebih dari satu kelompok etnis yang memiliki preferensi mata pencaharian yang berbeda.

(Mahfud Effendy, 2009)Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi diwilayah pesisir. Keseluruhan proses diatas menurut (Sorensen dan McCreary, 1990), harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan serta konflik pemanfaatan sumber daya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada. Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan ini mencakup empat aspek (Dahuri et al, 2001): (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektoral; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholders.

Keterpaduan ekologis: secara ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan



lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan dilahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, perhubungan laut. Penanggulangan pencemaran dan sedimentasi yang diakibatkan oleh limbah industri tidak dapat dilakukan hanya di kawasan pesisir saja tetapi harus dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini harus diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah daratan dan laut.

Keterpaduan sektor: sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor- sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kegiatan suatu sektor tidak dibenarkan mengganggu apalagi sampai mematikan kegiatan sektor lain. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral.

Keterpaduan disiplin ilmu: wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya.

Keterpaduan stakeholder: segenap keterpaduan diatas akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir. Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumber daya pesisir antara lain terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan pesisir. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up.

Dengan latar belakang pemikiran diatas akan muncul model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan sustainable development yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial (Harris et al, 2001 dalam Dahuri, 2003). Suatu pembangunan kawasan pesisir, pertama secara ekonomi dianggap

berkelanjutan (economic growth) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan; kedua secara ekologis dianggap berkelanjutan (ecological sustainability) manakala basis ketersediaan sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan pengembangan bahan substitusinya secara memadai, dan ketiga secara sosial dianggap berkelanjutan (social equity) apabila kebutuhan dasar seluruh penduduknya terpenuhi; terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil. Menurut Bengen (2004) pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan terwujud apabila memenuhi tiga persyaratan ekologis: (1) pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang sesuai dengan daya dukungnya; (2) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang harmonis; dan (3) pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan.

### **3. Isu-Isu Pengelolaan Sumber Daya Pesisir**

Dalam panduan Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat tahun 2003 menjelaskan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memiliki potensi yang sangat besar, baik hayati maupun non hayati. Namun hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih jauh dari

optimal dan berkelanjutan. Bahkan, karena tingkat pemanfaatan dan pengelolaan yang masih jauh dari yang diharapkan, banyak sumber daya pesisir tersebut dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab, dicuri, hingga mengalami degradasi. Ada banyak faktor penyebab terjadinya degradasi sumber daya wilayah pesisir yang pada akhirnya mengakibatkan potensi yang ada didalamnya tidak dapat memberikan manfaat lestari bagi kelanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah garis besar isu-isu umum yang ditemukan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

#### 1. Isu Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aktor atau penggerak utama dalam proses-proses pengelolaan sumber daya pesisir. Harmonisasi dan konsistensi visi, strategi, dan tujuan-tujuan pembangunan antar level dan lembaga pemerintahan sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap lembaga secara umum mempunyai mandat, aturan, tujuan, dan kebijakan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan upaya-upaya pengelolaan mengalami hambatan. Isu-isu kelembagaan yang umum dalam pengelolaan pesisir antara lain:

1. Rendahnya kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan terpadu.

2. Kurangnya pengetahuan mengenai pengaruh ekosistem terhadap kegiatan manusia.
3. Konflik dan tumpang tindih peraturan antarlembaga dan tingkatan pemerintahan.
4. Kurangnya dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir.
5. Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada Pengelolaan tradisional yang kurang mendapat perhatian pemerintah sehingga sering bertentangan dengan undang-undang dan pengelolaan modern.

Dalam hal pengelolaan tradisional, perlu dipahami bahwa tidak semua praktik pengelolaan tradisional digolongkan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada berbagai kegiatan pengelolaan secara tradisional yang sifatnya merusak (destruktif), seperti adanya sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan bahan peledak, penangkapan dengan sistem “paka-paka” dengan cara berjalan di atas karang dan menakut-nakuti ikan (soma paka-paka), penangkapan dengan menggunakan igi atau bubu yang merusak karang, dan pembuatan perangkap dengan membuat kolam dari karang di atas hamparan terumbu karang, adalah berbagai contoh Cara penangkapan atau pengelolaan tradisional yang sifatnya destruktif.

## 2. Isu Sosial

Perkembangan penduduk yang cukup pesat di wilayah pesisir dan masalah kemiskinan adalah isu-isu sosial yang dominan ditemukan di wilayah pesisir. Isu-isu sosial ini jika tidak ditangani akan memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya pesisir. Isuisu umum yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk yang cepat di wilayah pesisir
  2. Kemiskinan yang terkonsentrasi di desa-desa pesisir
  3. Hilangnya akses oleh masyarakat pengguna sumber daya pesisir
  4. Pengetahuan terhadap nilai sumber daya pesisir yang masih rendah
  5. Sanitasi dan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir yang masih rendah
  6. Meningkatnya konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir
3. Isu Bio-fisik Lingkungan

Laju degradasi lingkungan di wilayah pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem pesisir karena aktivitas manusia dan oleh alam. Ekosistem terumbu karang, termasuk kekayaan keanekaragaman ikan dan invertebrata, telah mengalami kerusakan yang cukup parah di berbagai tempat sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan cara merusak

seperti penggunaan bom, racun sianida, dan pukat harimau. Termasuk pula akibat kegiatan non perikanan lainnya seperti penambangan karang, reklamasi pantai, polusi dari darat, dan sedimentasi. Isu-isu spesifik yang ditemukan di wilayah pesisir antara lain:

1. Menurunnya kualitas air akibat polusi
2. Menurunnya ikan-ikan yang hidupnya tergantung pada daerah pesisir (lahan basah/wetland, rawa, dan lain-lain) akibat penangkapan yang berlebihan
3. Pengrusakan habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan pantai maupun Danau akibat penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan, penambangan Pasir, dan reklamasi pantai.
4. Pembangunan garis pantai maupun danau yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang
5. Banjir

Melihat potensi dan ancaman terhadap ekosistem dan sumber daya wilayah pesisir tersebut, maka suatu upaya pengelolaan mutlak diperlukan.

#### **4. Tujuan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu diwujudkan untuk menggunakan, menikmati, membangun, merawat, mengkonservasi dan

melindungi sumber daya alamnya. Dalam Kep.10/Men/2002, Rencana Pengelolaan telah didefinisikan sebagai beberapa kegiatan normatif yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam suatu zona, mulai dari sistematik pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan strategi pada penciptaan kegiatan khususnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Definisi ini perlu peninjauan kembali jika dibandingkan dengan hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu. (Bappeda Sulteng, 2005).

Pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu adalah suatu proses literatif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari ICZPM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZPM adalah keterpaduan (integration) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir harus berdasarkan kepada : (1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (ekohidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola; (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3) kebutuhan saat



ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa lingkungan pesisir.

(Bappeda Sulteng, 2005) Fungsi-fungsi Pengelolaan dalam konsep ICZPM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam sektor publik, hal ini adalah tanggung jawab instansi pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir harus membentuk kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung pembuatan keputusan oleh administrator sektoral dalam pengelolaan, penggunaan dan pengalokasian sumber daya secara tepat. Dalam kegiatan pengelolaan diperlukan untuk mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, struktur dan komposisi badan/panitia pengelolaan. Diperlukan juga sistem terkoordinasi untuk mengeluarkan dan mengadministrasikan izin penggunaan sumber daya oleh dinas-dinas teknis.

(Bappeda Sulteng, 2005) Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu: Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir, terkendalinya reklamasi pantai, terkendalinya

pencemaran perairan, tertatanya permukiman kumuh, kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove, terkendalinya masalah banjir dan abrasi serta sedimentasi.

(Syaiful Arifin, 2014) Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik serta mempercepat kerusakan sumber daya pesisir adalah lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi kondisi tersebut harus dilakukan peningkatan koordinasi kelembagaan yang melibatkan dinas/instansi daerah seperti Bappeda/Bappeko, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Perhubungan dan kepelabuhan, BPN, dan lain-lain. Upaya yang harus dilakukan adalah menghilangkan ego sektor dengan penegasan kembali fungsi dan kewenangan masing-masing dinas/instansi terkait, serta harus ada selalu diadakan rapat koordinasi untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut pengelolaan wilayah pesisir itu sendiri.

(Syaiful Arifin, 2014) Di samping kelembagaan pemerintah, peran kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, serta dunia usaha adalah penting dan harus terlibat dalam pengelolaan, utamanya pada tataran perencanaan dan monitoring/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. (Syaiful Arifin, 2014)

## **5. Manfaat Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan

kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir. (Neni Nurani, 2008).

## **6. Prinsip Dasar (asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu**

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang berasaskan: Keterpaduan Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Berkelanjutan Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan Keterbukaan Keersamaan dan Kemitraan Perlindungan Kepentingan Umum Kepastian hukum dan keadilan Akuntabilitas

Penataan Penataan ruang dilakukan secara terpadu, dan yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib

sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten.

Penataan ruang harus berdaya guna dan berhasil guna dimana harus dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang. Kemudian, serasi, selaras, dan seimbang dengan maksud bahwapenataan ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, antar daerah, serta antara sektor dan daerah dalam satu kesatuan wilayah. Kemudian, penataan ruang berasaskan berkelanjutan yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi

## **7. Penyusunan Rencana Strategi Dan Arahan Pengelolaan**

Pendekatan program yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan laut Kabupaten/Kota adalah:

1. Pendekatan Akomodatif, yaitu dokumen ini diharapkan memenuhi kebutuhan berbagai pihak pengguna sumber daya di wilayah pesisir Kabupaten/Kota.
2. Pendekatan Suportif, yaitu dokumen ini diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten/Kota

3. Pendekatan Protektif, yaitu mengandung makna bahwa dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan arahan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten/Kota, yang secara ekologis sangat penting, yaitu vegetasi mangrove, terumbu karang, dan sumber daya biotik dan abiotik lainnya.
4. Pendekatan Aspiratif, yaitu dokumen ini diharapkan mampu mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan potensi kerusakan sumber daya.

Sedangkan proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat yang melibatkan semua sektor seperti pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, perguruan tinggi, dan LSM. Proses penyusunan Renstra diawali dari pertemuan semua stakeholders, dilanjutkan dengan identifikasi isu-isu yang ada di Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota. Selanjutnya hasil dan identifikasi dilakukan:

1. Verifikasi isu pada Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota
2. Klarifikasi permasalahan
3. Kontribusi isu oleh semua Stakeholders
4. Mengumpulkan semua isu kelembagaan dalam pengelolaan

Setelah isu terkumpul dilakukan penyusunan draft dokumen renstra melalui pertemuan-pertemuan mneghasilkan rumusan dalam

menyepakati Visi dan Misi pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut.  
(Jufriadi, 2014).



## H. Tabel Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
S.Kamran Aksa	Studi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong	Penggunaan Lahan Topografi	Analisis Pembobotan	Arahan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong
Besse Nurliah Razak	Identifikasi Permukiman Kawasan Rawan Banjir DAS Cendranae (Studi Kasus: Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo).	Variabel 1. Penggunaan lahan 2. Topografi 3. Kemiringan Lereng	Analisis 1. SWOT 2. Regresi Berganda	Merumuskan Kawasan Rswsn Banjir di Kawasan Danau Tempe



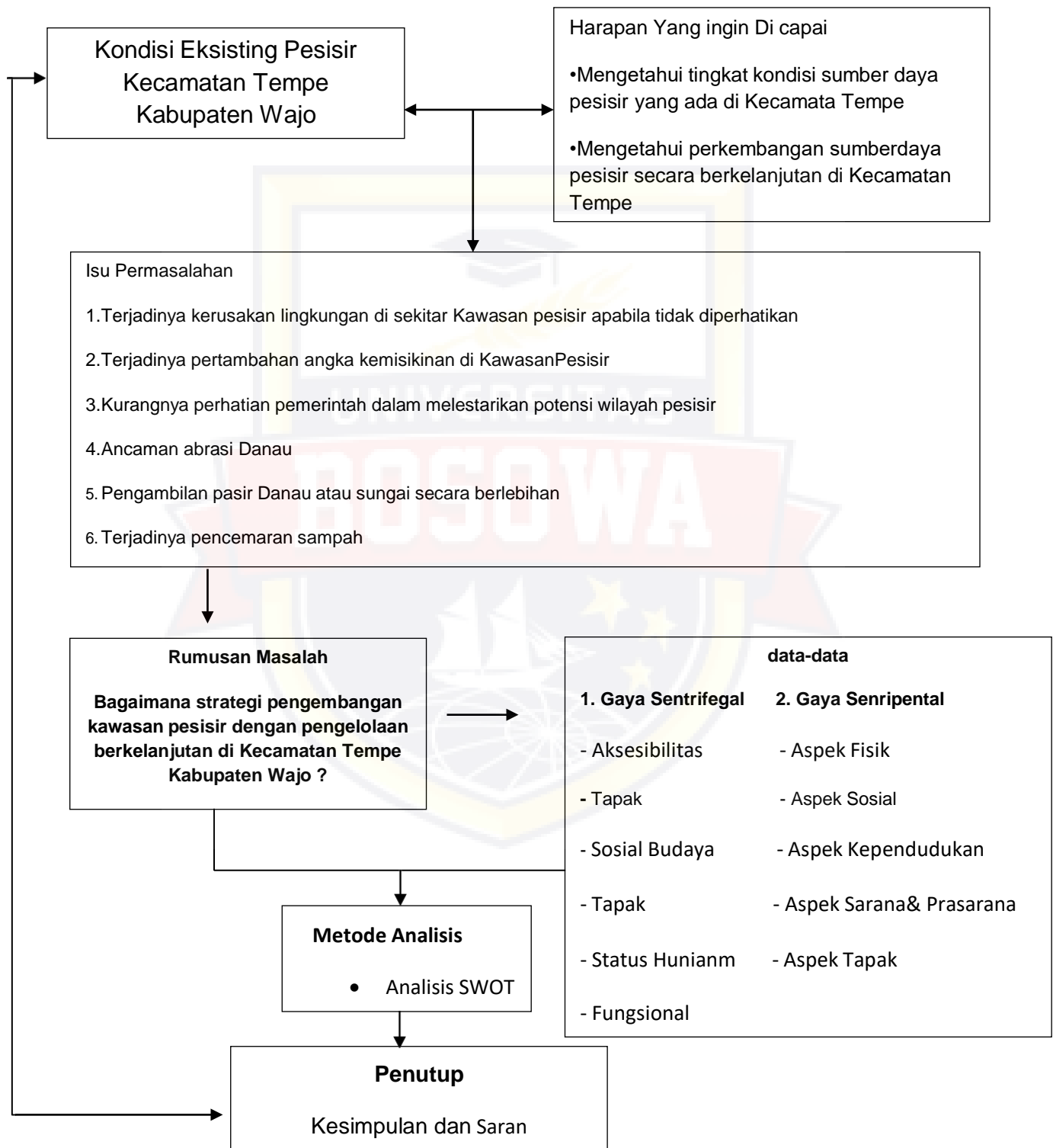
Didim Suwandi Ilyas	Studi Pemanfaatan Ruang Daerah Tangkapan air Danau Toba Serta Hubungannya dengan RTRW Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara	Penggunaan Lahan	Uji Chi-Square	Arahan Pemanfaatan Ruang Daerah Tangkapan air Danau Toba
Besse Nur Adina	Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Wilayah Sekitar Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ( Studi Kasus : Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo).	Variabel Rawan Banjir  1. Penggunaan lahan 2. Jenis Tanah 3. Topografi 4. Kemiringan Lereng	Analisis  1. Regresi Berganda 2. SWOT	Hasil Penelitian ini dimaksudkan untuk bagaimana saja strategi agar bencana banjir di sekitaran Danau Tempe dapat diatasi.
Asrinah	Studi Pemanfaatan Ruang Kawasan Wisata Danau Biru Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara	Kecurman lereng Jenis Tanah Kemampuan Lahan Intensitas Hujan	Pembobotan	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan danau Wisata Danau Biru

Tri Nanda Permata Sari Hayat	Prospek Pengembangan Pariwisata Danau Matano dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur	Topografi Penggunaan Lahan Daya Tarik Wisata	Analisis SWOT	mengetahui strategi prospek pengembangan pariwisata di Danau Matano Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan.
Eka Wahyuni Abdu Rahman	Penataan Danau Mawang Dengan Pendekatan Ekowisata Di Kabupaten Gowa	Topografi Sosial Budaya Penggunaan Lahan	Analisis Perancangan	Menghasilkan desain teknis untuk penataan Danau Mawang dengan pendekatan ekowisata
Maseruni Sultan	Studi Penggunaan Lahan di Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo	Variabel 1. Aksesibilitas 2. Tapak 3. Sosial Budaya 4. Status Hunian 5. Fungsional	Analisis Swot	Arahan penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe

Fadhil Surur	Pemanfaatan Ruang Danau Tempe Oleh Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Pallimae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.	Sosial Budaya	Analisis SWOT	Arahan pemanfaatan ruang Danau tempe oleh masyarakat nelayan tradisional
Agnes Veronika Ralampi	Strategi pengembangan objek Wisata Danau Poso pada Dinas Parawisata Kabupaten Poso	Sosial Budaya Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	Analisis SWOT	Arahan Strategi Pengembangan Wisata Danau Poso

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dapat dilihat dari tabel di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pengelolaan sumber daya pesisir Kawasan Danau. karena dari beberapa penelitian terdahulu Sebagian besar danau yang berada Di Indonesia belum optimal dalam pemanfaatan Ruang dan pengelolaan sumber daya . maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji “Bagaimana Strategi pengelolaan sumber daya pesisir danau tempe berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan di pesisir danau tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

## I. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Adapun penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data-data substansi atau angka sebagai bahan perbandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. Kedua metode tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian mengenai pengembangan kawasan pesisir yang berkelanjutan Kecamatan Tempe.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli – Agustus di Kabupaten Wajo. Di Kabupaten Wajo, Danau Tempe berada pada 4 (empat) Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Belawa Penelitian ini berfokus dilakukan pada wilayah Kawasan di sekitar pinggiran Danau Tempe tepatnya di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di Kecamatan Tempe.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada penelitian yaitu observasi lapangan, wawancara dan pengamatan langsung, studi dokumentasi, dan studi literatur. Penerapan teknik pengumpulan data bergantung kepada kebutuhan data yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Observasi Lapangan Observasi lapangan merupakan hasil pengumpulan data berupa fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan lahan di Kota Sengkang dan daerah pinggiran danau.
- 2) Studi Dokumentasi Untuk melengkapi data, maka kita memerlukan informasi dari dokumenatsi yang ada hubungannya dengan objek yang menajdi studi. Dokumentasi dapat berupa penyajian dalam bentuk visual tentang kondisi lapangan.
- 3) Studi Kepustakaan Penelitian yang memenuhi syarat tidak dapat dilakukan tanpa mengausai teori, prinsip, konsep dan hukum-hukum yang berlaku menyangkut penggunaan lahan. Kita memerlukan data yang bersifat teoritis. Pendapat para ahli dalam berbagai hal yang relevan dengan apa yang sedang dikaji, konsep-konsep teoritis dan operasional tentang penelitian dan lain sbegainya, dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

## D. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu :

- Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan pada lokasi penelitian yaitu data karakteristik wilayah penelitian, kondisi penggunaan lahan.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, baik dari pemerintah maupun swasta berupa data kependudukan, data geografis meliputi peta-peta.

### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data pendukung hasil analisis Strategi Pengelolaan Sumber daya di pesisir danau tempe yang berkelanjutan bagi pengembangan Kawasan pesisir Kawasan Danau

- Data Primer Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil survei langsung ke lapangan berdasarkan pola dan penggunaan lahan pada daerah pinggiran danau bersinggungan langsung dengan kawasan perkotaan dan berdasarkan hasil analisis peta perubahan penggunaan lahan. Selain itu pengamatan kondisi tata

ruang Kawasan Danau Tempe pada saat ini dan arahan pengembangan kota serta pergeseran pusat pelayanan yang mengarah pada pinggiran danau. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung kelapangan serta didokumentasikan dengan penggunaan alat fotografi dan wawancara dengan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat serta pihak-pihak yang terkait untuk dijadikan sampel.

- Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS) merupakan data perkembangan, distribusi dan jumlah penduduk pada Kota Sengkang dari tahun 2011 sampai dengan 2021, Kantor badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wajo berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sengkang. Data primer dan sekunder yang telah didapatkan tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa variabel yang dapat diukur serta terkait dengan perkembangan Kota Sengkang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021.



## E. Variabel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Pembobotan

Metode pembobotan (faktor skoring) merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Variabel yang akan dinilai sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada bab II yaitu variabel tentang penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan gaya sentrifugal yaitu mendorong kegiatan berpindah dari kawasan (pusat kota) ke wilayah pinggiran dan gaya sentripental bekerja menahan fungsi-fungsi tertentu pusat kota dan menarik fungsi lainnya ke dalamnya.

Penilaian ini berdasarkan standar kriteria daya dukung lahan dan standar teknis kawasan pesisir danau yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahannya. Sehingga pembobotan ini menghasilkan nilai:

1. Kategori tinggi jika mempunyai bobot 5
2. Kategori sedang jika mempunyai bobot 3
3. Kategori rendah jika mempunyai bobot 1

**Tabel 3.1. Variabel Penelitian**

**Variabel dan Indikator Gaya Sentrifugal Penilaian Penggunaan Lahan di Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo**

No.	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	
1	Aksesibilitas	20	1	Moda Angkutan
			2	Kondisi Jalan
			3	Waktu Tempuh
			4	Jarak
2	Tapak	15	1	Harga Lahan
			2	Status Lahan
			3	Penguasaan Bangunan
			4	Frekuensi Bencana Banjir
3	Sosial Budaya	25	1	Partisipasi Masyarakat
			2	Lingkungan Masyarakat
			3	Prilaku Sosial Masyarakat
			4	Interaksi Sosial
4	Status Hunian	15	1	Jumlah Penduduk
			2	Menetap
			3	Hak Pakai
			4	Jumlah KK setiap rumah
5	Fungsional	25	1	Permukiman
			2	Pertanian
			3	Perikanan
			4	Perdagangan

Sumber : Pengelolaan Data 2022

**Tabel 3.2. Variabel Penelitian**  
**Variabel dan Indikator Gaya Sentripetal Penilaian Penggunaan**  
**Lahan di Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo**

No.	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	
1	Aspek Fisik	20	1	Topografi
			2	Ketersediaan Lahan
			3	Daya Dukung Lingkungan
			4	Daya Tampung Ruang
2	Aspek Sosial	20	1	Sistem Sosial
			2	Struktur Sosial
			3	Tingkat Pendidikan
			4	Tingkat Pengangguran
3	Aspek Kependudukan	10	1	Jumlah Penduduk
			2	Kepadatan Penduduk
			3	Tingkat Pertambahan Penduduk
			4	Urbanisasi dan Migrasi
4	Aspek Sarana	20	1	Ketersediaan Sarana Fasos dan Fasum
			2	Jenis Sarana
			3	Besarnya ruang terbuka
			4	Kondisi sanitasi Lingkungan
5	Aspek Prasarana	20	1	Pelayanan Jaringan Jalan
			2	Pelayanan Air Minum
			3	Pelayanan Persampahan
			4	Ketersediaan Drainase
6	Aspek Tapak	10	1	Status Tanah
			2	Harga Lahan
			3	Status Penguasaan Bangunan
			4	Frekuensi Bencana Banjir

#### **F. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT. Untuk menjawab rumusan masalah tentang pengembangan sumberdaya pesisir di Kecamatan Tempe dapat diketahui menggunakan

analisis SWOT yang merupakan suatu alat efektif dalam membantu menstruktur masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang antara lain:

- a) Kekuatan (Strengths) adalah faktor internal sebagai pendorong untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
- b) Kelemahan (Weaknesses) adalah mengidentifikasi faktor internal yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
- c) Peluang (Opportunities) adalah faktor eksternal yang mendukung untuk mencapai pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
- d) Ancaman (Threats) adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pengembangan kawasan pesisir dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

**Tabel 3.3**

**Model Analisis Faktor Strategis Eksternal (EFAS)**

No	Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1.	<b>Peluang :</b>  (Faktor-faktor yang menjadi peluang)	(Professional Judgement)	(Professional Judgement)	(Jumlah perkalian bobot dengan nilai pada setiap faktor dari peluang)
	Jumlah	(Jumlah bobot peluang)	(Jumlah nilai peluang)	(Jumlah bobot X nilai peluang)
2.	<b>Ancaman :</b>  (Faktor-faktor yang menjadi ancaman)	(Professional Judgement)	(Professional Judgement)	(Jumlah perkalian bobot dengan nilai pada setiap faktor dari ancaman)
	Jumlah	(Jumlah bobot ancaman)	(Jumlah nilai ancaman)	(Jumlah bobot X nilai ancaman)

Sumber: Feddy Rangkuti, 2001

**Tabel 3.4**

**Model Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS)**

No	Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
1	<b>Kekuatan :</b> (Faktor-faktor yang menjadi kekuatan)	(Professional Judgement)	(Professional Judgement)	(Jumlah perkalian bobot dengan nilai pada setiap faktor dari kekuatan)
	Jumlah	(Jumlah bobot kekuatan)	(Jumlah nilai kekuatan)	(Jumlah bobot nilai kekuatan)
2	<b>Kelemahan :</b> (Faktor-faktor yang menjadi kelemahan)	(Professional Judgement)	(Professional Judgement)	(Jumlah perkalian bobot dengan nilai pada setiap faktor dari kelemahan)
	Jumlah	(Jumlah bobot kelemahan)	(Jumlah nilai kelemahan)	(Jumlah bobot X nilai kelemahan)

Tentukan strategi–strategi yang akan digunakan berdasarkan pertimbangan kombinasi keempat set faktor strategi tersebut. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana Peluang dan Ancaman eksternal yang dihadapi serta dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi (SO + WO + ST + WT), untuk jelasnya pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Model Matriks Analisis SWOT**

EFAS IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi SO</b> (strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)	<b>Strategi WO</b> (strategi yang Meminimalkan kelemahan dan Memanfaatkan peluang)
<b>Ancaman (T)</b>	<b>Strategi ST</b> (strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman)	<b>Strategi WT</b> (strategi yang Meminimalkan kelemahan dan Menghindari ancaman)

### G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Definisi tersebut adalah:

- 1) Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu sadar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras.
- 2) Berkelanjutan adalah suatu konsep nilai yang meliputi tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi akan datang tanpa harus pula mengorbankan peluang generasi sekarang untuk

tumbuh dan berkembang serta meletakkan dasar-dasar pengembangan bagi generasi-generasi mendatang.

- 3) Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, social, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 4) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 5) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait



dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

- 7) Rehabilitas Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Gambaran umum wilayah atau kondisi daerah merupakan penjelasan tentang kondisi/letak geografis dan administrasi serta kondisi fisik lahan yang berada di lokasi penelitian. Adapun penelitian ini berada di Kabupaten Wajo. Berikut merupakan letak geografis dan administrasi serta kondisi fisik lahan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat.

a) Letak Geografis dan Administrasi Secara astronomis, Kabupaten Wajo terletak antara  $3^{\circ} 39'$  -  $4^{\circ} 16'$  LS dan  $119^{\circ} 53'$  sampai dengan  $120^{\circ} 27'$  BT. Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Wajo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng. Sebelah timur berbatasan dengan


Teluk Bone. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

Adapun kecamatan terluas di Kabupaten Wajo yaitu Kecamatan Keera dengan luas wilayah 368,36 km<sup>2</sup> atau 14,70% dan Kecamatan Majauleng dengan luas wilayah yaitu 225,92 km<sup>2</sup> atau 9,01% dari luas keseluruhan Kabupaten Wajo. Dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Tempe dengan luas wilayah yaitu 38,27 km<sup>2</sup> atau 1,53% dari luas keseluruhan Kabupaten Wajo. Berikut adalah tabel kecamatan yang berada di Kabupaten Wajo beserta luas wilayahnya.

**Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Wajo Dirinci Berdasarkan**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sabbangparu	132,75	5,30
2	Tempe	38,27	1,53
3	Pammana	162,10	6,47
4	Bola	220,13	8,79
5	Takkalalla	179,76	7,17
6	Sajoanging	167,01	6,66
7	Penrang	154,90	6,19
8	Majauleng	225,92	9,01
9	Tanasitolo	154,60	6,17
10	Belawa	172,30	6,87
11	Maniangpajo	175,96	7,02
12	Gilereng	147,00	5,86
13	Keera	368,36	14,70
14	Pitumpanua	207,13	8,26
Wajo		2.507,19	100

## Kecamatan Tahun 2021



*Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka, 2021*

### **B. Kondisi Fisik Wilayah**

Kondisi fisik wilayah dalam hal ini menjelaskan kondisi wilayah yang berada di Kabupaten Wajo pada umumnya berupa topografi dan kemiringan lereng, jenis tanah, dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Berikut merupakan kondisi fisik wilayah yang berada di Kabupaten Wajo :

- 1) Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Kabupaten Wajo sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 25 m di atas permukaan air laut seluas 84% dari total luas wilayah Kabupaten Wajo. Titik wilayah terendah berada di daerah Danau Tempe dan

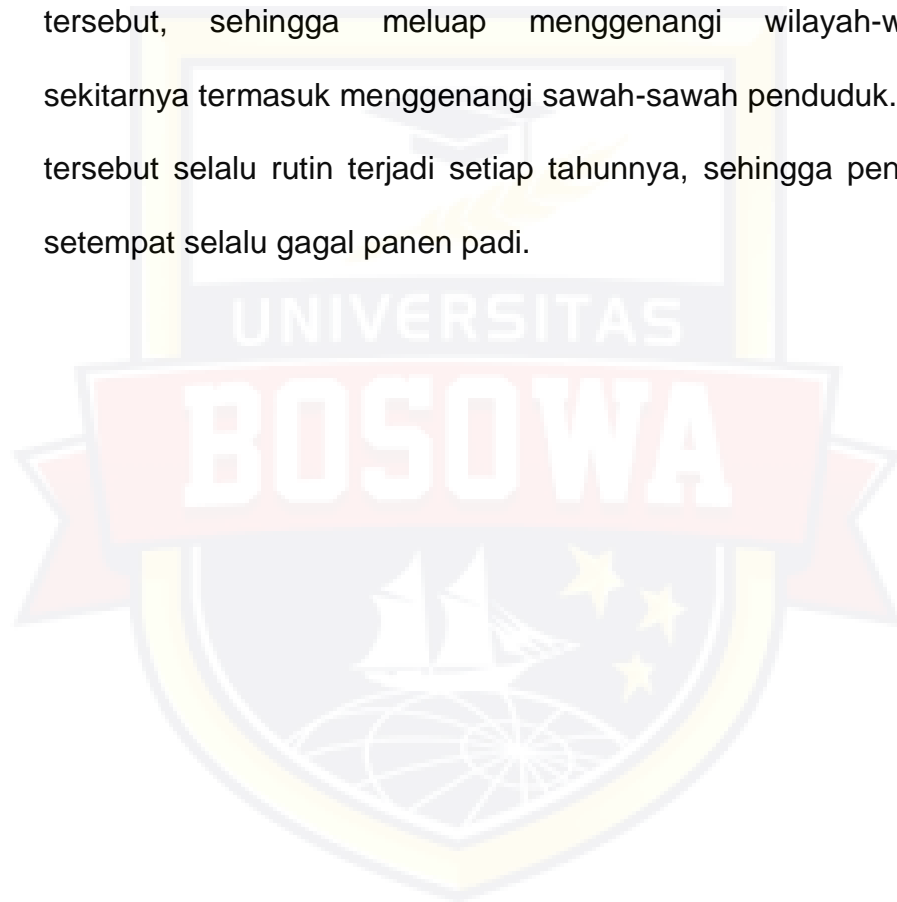
sekitarnya. Perbatasan wilayah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten lainnya sebagian besar berupa wilayah Pegunungan. Posisi wilayah Kabupaten Wajo yang demikian menyebabkan daerah Kabupaten Wajo sering mendapatkan limpasan air hujan di musim penghujan dari daerah-daerah sekitarnya yang kedudukan wilayahnya lebih tinggi. Akibatnya pada wilayah-wilayah kecamatan pada dataran rendah di Kabupaten Wajo merupakan daerah yang sering mengalami bencana banjir (banjir tahunan).

- 2) Kemiringan Lereng Sebagian besar wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2% luasnya mencapai 212,341 Ha atau sekitar 84%, sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/lereng 3-15% luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan/lereng di atas 16-40 % luas 13,752 Ha (5,50%) dan kemiringan lahan diatas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).
- 3) Jenis Tanah Kabupaten Wajo memiliki jenis tanah yang tersebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Wajo. Jenis tanah Inseptisol merupakan jenis tanah yang paling banyak ditemukan di

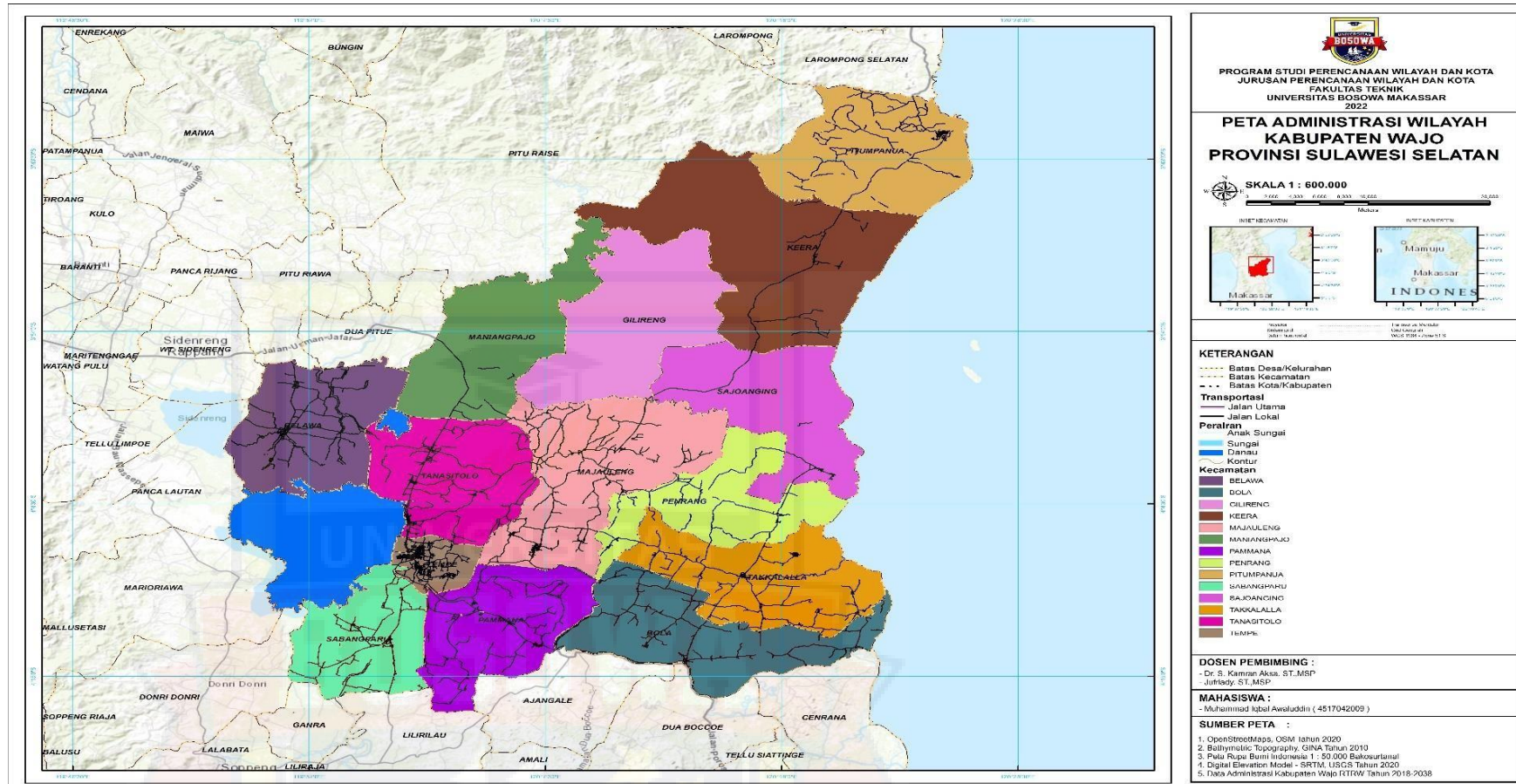
Kabupaten Wajo dan jenis tanah entisol merupakan jenis tanah yang paling sedikit di temukan di Kabupaten Wajo.

- 4) Daerah Aliran Sungai (DAS) Terdapat beberapa sungai, jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : (a) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun yang biasanya bersumber dari mata air berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Jumlah sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Wajo tercatat sekitar 7 (tujuh) sungai yang mengalir berbagai wilayah kecamatan maupun desa. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Bila, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, dan Sungai Awo. Selain sungai, di wilayah Kabupaten Wajo terdapat pula beberapa danau, yaitu danau Tempe (9445 Ha) sebagai danau terbesar di wilayah Wajo, Lapongpakka (1960 Ha), Lampulung (1000 Ha), Buaya (360 Ha), Lapapolo (37 Ha), Penrang riawa (25 Ha), Cenranae (24 Ha), Dori'e (6 Ha).
- 5) Penggunaan Lahan Pola penggunaan lahan di wilayah kawasan Danau Tempe didominasi oleh jenis penggunaan lading/huma/tegalan yakni seluas 14.698, 60 ha atau sebesar 29,52 % dari luas wilayah kawasan Danau Tempe (wilayah empat Kecamatan). Penggunaan untuk sawah (irigasi teknis, semi teknis dan sawah tadah hujan ) seluas 12.597,38 ha atau sebesar 25,30

%. Kondisi penggunaan lahan untuk sawah di wilayah ini tidak terlalu dominan dipengaruhi oleh faktor tingginya fluktuasi permukaan air Danau Tempe. Ketika musim penghujan atau hujan deras di hulu Sungai Bila dan Walanae (banjir bandang). Danau Tempe tidak mampu menampung luapan air dari kedua sungai tersebut, sehingga meluap menggenangi wilayah-wilayah sekitarnya termasuk menggenangi sawah-sawah penduduk. Banjir tersebut selalu rutin terjadi setiap tahunnya, sehingga penduduk setempat selalu gagal panen padi.

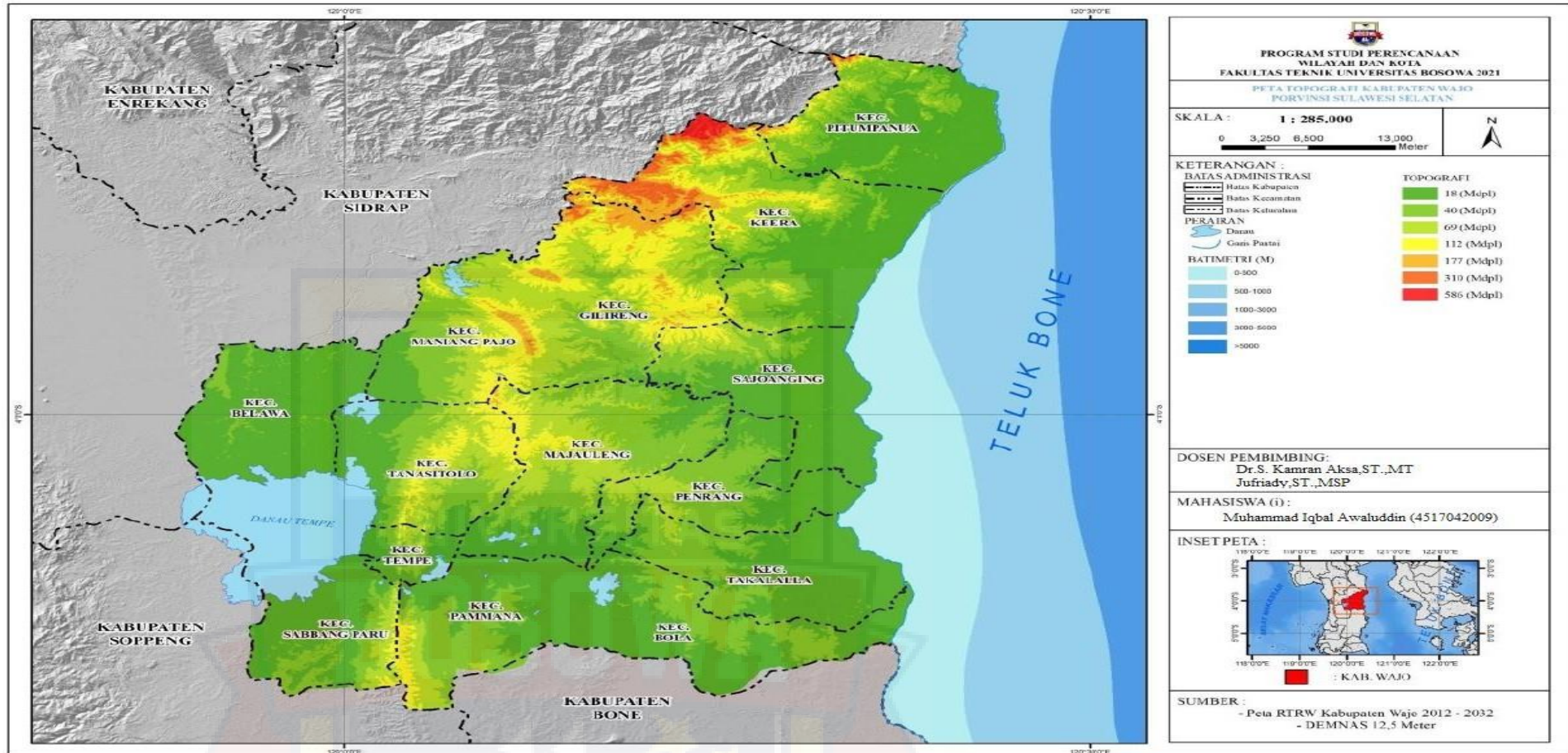


**Gambar 4.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Wajo**

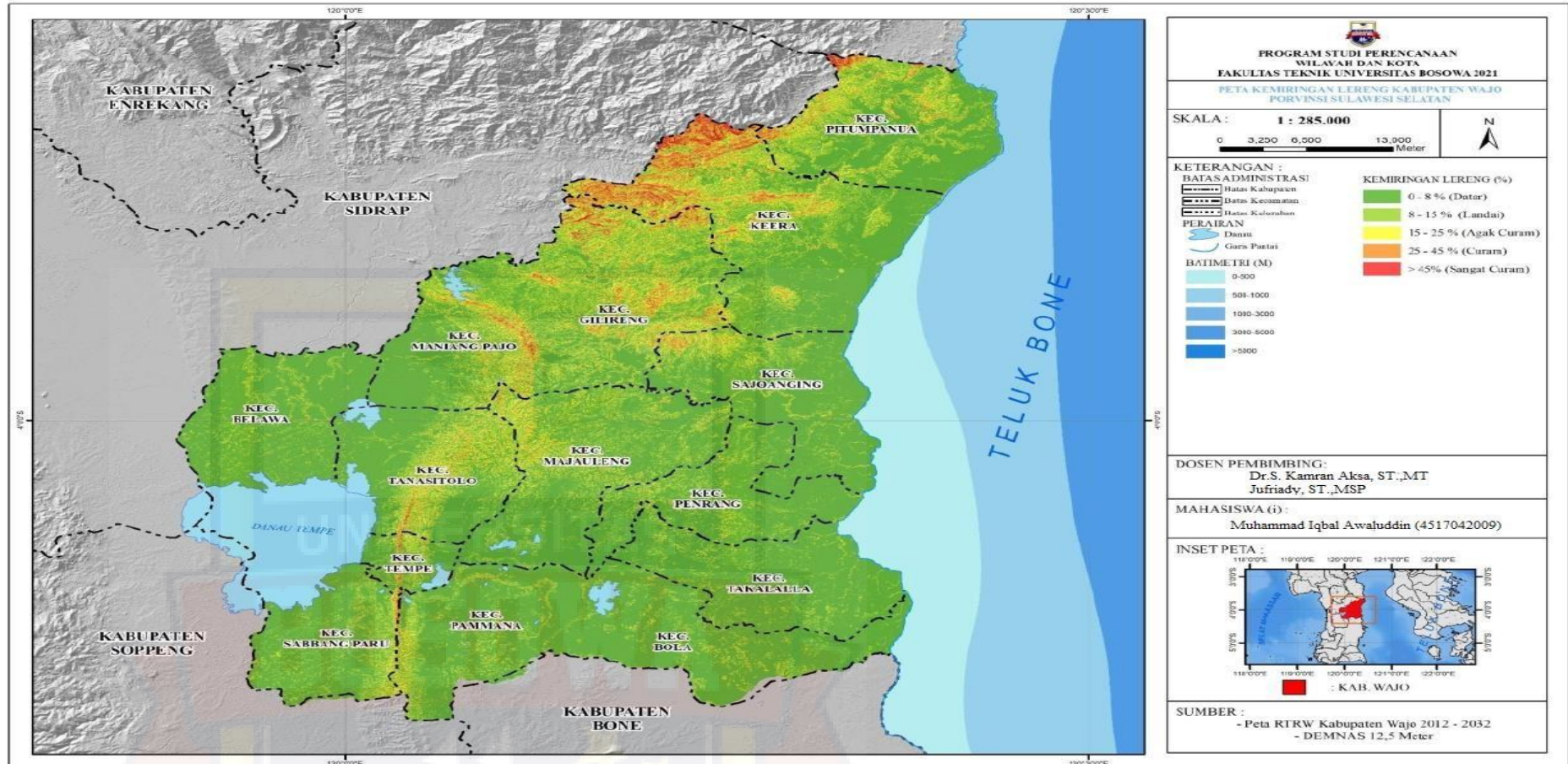




Gambar 4.2  
Peta Topografi Kabupaten Wajo

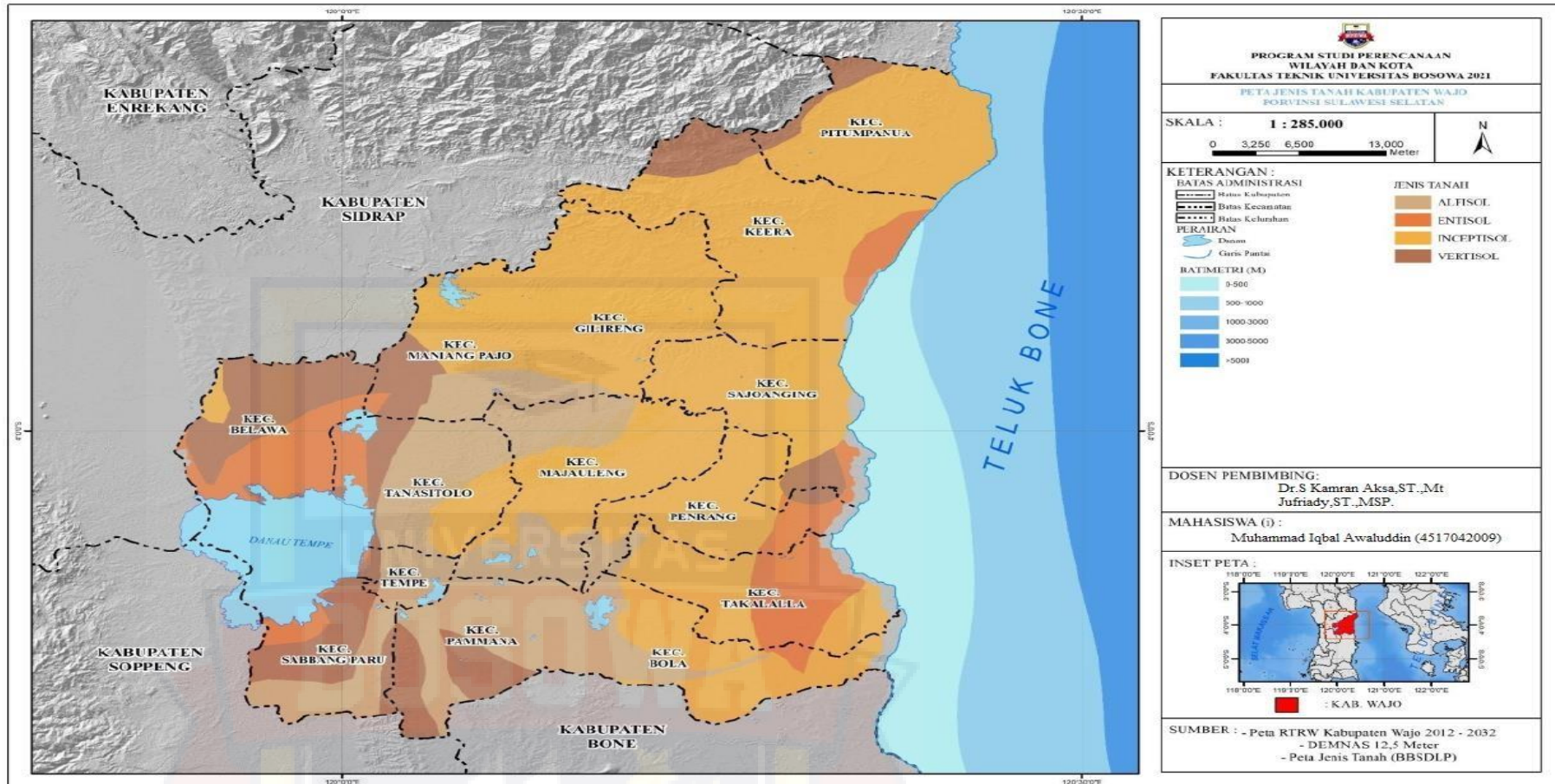


**Gambar 4.3**  
**Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Wajo**





**Gambar 4.4**  
**Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo**



### **C. Gambaran Umum Lokasi**

Kecamatan Tempe merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Wajo dan merupakan Kecamatan yang luasnya terkecil dengan luas wilayah yaitu 38,27 km<sup>2</sup> atau 1,53% dari luas keseluruhan Kabupaten Wajo. Adapun batas geografis Kecamatan Tempe yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanasitolo, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabbamparu, sebelah barat berbatasan dengan Danau Tempe, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Majauleng. Kecamatan tempe terbagi menjadi 16 desa/kelurahan. Dimana desa/kelurahan yang terluas yaitu Kelurahan Wiringpalennae dengan luas wilayah itu 5,11 km<sup>2</sup> atau 13,55% dari luas keseluruhan Kecamatan Tempe. Dan Desa/Kelurahan yang terbesar kedua yaitu Kelurahan Pattirosompe dengan luas wilayah yaitu 4,49 km<sup>2</sup> atau 11,73% dari luas keseluruhan Kecamatan Tempe. Dan Desa/Kelurahan yang luasnya paling kecil yaitu Kelurahan Teddaopu dengan luas wilayah yaitu 0,82 km<sup>2</sup> atau 2,14% dari luas keseluruhan Kecamatan Tempe. Berikut ad alah nama-nama dan luas wilayah desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Tempe.

**Tabel 4.2. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Wiringpalennae	5.11	13.35
2	Sitampae	2.33	6.09
3	Atakkae	2.85	7.45
4	Maddukkelleng	4.18	10.92
5	Sengkang	1.54	4.02
6	Padduppa	1.60	4.18
7	Pattirosompe	4.49	11.73
8	Cempalagi	3.52	9.20
9	Bulupabbulu	1.15	3.00
10	Lapongkoda	0.91	2.38
11	Teddaopu	0.82	2.14
12	Salomenraleng	2.85	7.45
13	Laelo	1.95	5.10
14	Watallipue	1.10	2.87
15	Tempe	1.70	4.44
16	Mattiroappareng	2.17	5.67
	Tempe	38.27	100

**Kecamatan Tempe Tahun 2021**

*Sumber : Kecamatan Tempe Dalam Angka, 2021*

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Tempe terdapat 16 desa/kelurahan. Dan dalam penelitian ini untuk lokasi penelitian hanya terdapat pada 4 (empat) kelurahan saja yaitu Kelurahan Laelo, Kelurahan

Salomenraleng, Kelurahan Tempe dan Kelurahan Mattirotapareng. Dikarenakan 4 (empat) kelurahan ini merupakan kelurahan yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe. Selain itu juga karena lokasi yang berbatasan langsung dengan Danau Tempat kelurahan-kelurahan ini juga merupakan kelurahan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya alam danau seperti perikanan, pertanian dll.

a) Profil Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti terdapat di Kecamatan Tempe dimana Kecamatan Tempe terdapat 16 desa/kelurahan dan terdapat 4 (empat) kelurahan yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe yaitu Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Tempe, dan Kelurahan Mattirotapareng. Dan berdasarkan data yang di dapatkan dari BPBD Kabupaten Wajo bahwa di Kecamatan Tempe yang mendapat mengalami banjir terparah dan dampak yang besar yaitu di 4 (empat) kelurahan ini. Dengan luas lokasi penelitian yaitu 8,67 km<sup>2</sup>. Adapun letak astronomi dari lokasi penelitian ini yaitu berada di 4°7.891' LS dan 120°1.379' BT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3****Luas Wilayah****Lokasi**

No	Lokasi	Luas ( km <sup>2</sup> )
1	Laelo	1,95
2	Mattiroappareng	2,17
3	Salomenraleng	2,85
4	Tempe	1,70
	Total	8,67

**Penelitian**

*Sumber : Kecamatan Tempe Dalam Angka, 2021*

b) Aspek Kependudukan

- 1) Distribusi dan Kepadatan Penduduk di lokasi penelitian ini terdapat 1 (satu) kelurahan yang jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbesar kedua di Kecamatan Tempe yaitu Kelurahan Tempe. Dan juga Kelurahan Laelo merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Tempe. Berikut adalah tabel distribusi kepadatan penduduk.

**Tabel 4.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Lokasi Penelitian,****Tahun 2021**

Lokasi	Jumlah Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Laelo	1.690	1,95	867
Salomenraleng	1.710	2,85	600
Tempe	7.692	1,70	4.525
Mattirotapareng	3.811	2,17	1.757
Lokasi Penelitian	14.903	8,67	7.749

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dilokasi penelitian penduduk yang berjumlah besar terdapat di Kelurahan Tempe dengan jumlah penduduk 7.692 jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 1.757 jiwa/km<sup>2</sup>. Dan penduduk jumlah penduduk yang terkecil yaitu Kelurahan Laelo dengan jumlah penduduk 1.690 jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 867 jiwa.

- 2) Perkembangan Jumlah Penduduk Adapun perkembangan jumlah penduduk di lokasipenelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**

**Perkembangan Jumlah penduduk di Lokasi Penelitian**



No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Perkembangan (Jiwa)
1	2017	14.965	-
2	2018	15.082	117
3	2019	15.208	126
4	2020	15.323	115
5 <sup>47</sup>	2021	14.903	-420

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan penduduk mulai dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk yang cukup besar pada tahun 2020. Terjadi penurunan jumlah penduduk di karenakan tingginya angka kematian yang terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh wabah covid 19 atau korona. Selain itu juga adanya masyarakat yang memilih pindah dari lokasi penelitian ke daerah lain menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di lokasi penelitian.

- c) . Kondisi Fisik Kondisi fisik lahan dalam hal ini menjelaskan kondisi alam yang berada di Lokasi Penelitian yaitu kelurahan-kelurahan yang berbatasan langsung dengan Danau Tempe. Danau Tempe terletak di Provinsi Sulawesi Selatan pada koordinat 119°53' - 120°04' Bujur Timur dan 4°03' - 4°09' Lintang Selatan. Elevasi permukaan air danau bervariasi antara 3 m pada musim kemarau sampai 10 m dpi saat banjir. Danau Tempe termasuk tipe danau eutropis, yaitu tipe danau yang berbentuk cawan yang datar dengan karakteristik tersedianya lahan pasang surut yang luas di sekitar danau. Danau Tempe terietak pada dataran rendah yang merupakan tempat menampung air Sungai Bila, Sungai Walennae

dan sungai-sungai kecil disekitarnya dengan Sungai Cenranae sebagai satusatunya sungai yang mengalirkan air keluar dari danau. Adapun kondisi fisik yang akan dijelaskan yaitu mengenai topografi, kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Berikut adalah kondisi fisik lahan yang berada di lokasi penelitian :

1. Topografi Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat mengetahui potensi dan kendala fisik perkembangan suatu kawasan atau wiiayah. Secara =urn, wiiayah yang berbatasan langsung dengan danau tempe berada di wiiayah dataran rendah dengan ketinggian 0-18 mdpl, 18-40 mdpl, dan 40-69 mdpl. Berikut adalah topografi lokasi peneiitian dan luasnya :

**Tabel 4.6.**

**Ketinggian dan Luas Ketinggian di Lokasi Penelitian**

No	Kelurahan dan Ketinggian	Luasan
1	Laelo	1,95
2	Mattiroappareng	2,17
	18 Mdpl	2,03
	40 Mdpl	0,14
3	Salomenraleng	2,85
	18 Mdpl	2,85
4	Tempe	1,70
	18 Mdpl	1,01

	40 Mdpl	0,49
	69 Mdpl	0,20
	Lokasi Penelitian	8,67

Sumber : GIS, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Laelo dan Kelurahan Salomenraleng hanya berada pada ketinggian 18 mdpl. Sedangkan Kelurahan Mattirotappareng berada di ketinggian 18 mdpl dan 40 mdpl. Dan hanya Kelurahan Tempe yang berada di ketinggian 18 mdpl, 40 mdpl, dan 69 mdpl. Adapun total keseluruhan lokasi penelitian lebih luas berada di ketinggian 18 mdpl dan ketinggian 69 mdpl hanya berada di 1 titik.

2. Kemiringan Lereng Kemiringan lereng menjadi salah satu faktor penting didalam melihat suatu lokasi rawan banjir atau tidak. Di lokasi penelitian terdapat 4 kemiringan lereng yaitu datar 0-8%, landai 8-15%, agak curam 15-25% dan curam 25-45%. Adapun tabel kemiringan lereng di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**

**Kemiringan Lereng dan Luasan di Lokasi Penelitian**

No	Kelurahan Dan Kemiringan	Luasan
1	Toelo	1,95
	Datar : 0 - 8 %	1,05
	Landai : 8 - 15 %	0,83
	Agak Curam : 15 - 25 %	0,07
	Mattirotappareng	2,17
	Maar 0 - 8 %	1,78
	Landai : 8 - 15 %	0,27
	Agak Curam : 15 - 25 %	0,11

	Curam : 25 - 45 %	0,01
3	Salomenraleng	2,85
	&tar : 0 - 8 %	2,20
	Landai : 8 - 15 %	0,48
	Agak Curam : 15 - 25 %	0,14
	Curam : 25 - 45 %	0,03
4	Tempe	1,70
	Alatar : 0 - 8 %	1,08
	Landai : 8 - 15 %	0,43
	Agak Curam : 15 - 25 %	0,10
	Curam : 25 - 45 %	0,09
Lokasi Penelitian		8,67

Sumber : GIS, 2021

3. Curah Hujan Wilayah Danau Tempe relatif kering. Daerah ini termasuk daerah peralihan antara iklim barat dan iklim timur di Sulawesi Selatan. Musim kemarau terjadi dua kali yaitu pada Bulan Januari, Februari dan Bulan Agustus, September, dan Oktober. Wilayah jangkauan kedua anak sungai utama, yakni Sungai Bila dan Walenae lebih basah, meskipun musim kemarau panjang dan simuttandan nyata, karena ketinggian wilayah danau hanya 5-6 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini merupakan daerah yang relatif kering dengan kelembaban yang tinggi. Iklim suatu wilayah atau kawasan sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di sekitaran Danau Tempe sehingga masyarakat sekitar terganggu perekonomian dan tidak dapat memaksimalkan sumber daya yang ada atau di lokasi penelitian. Berikut adalah tabel curah hujan dan luasan di lokasi penelitian :

No	Kelurahan dan Curah Hujan	Luasan
----	---------------------------	--------

**Tabel 4.8.**  
**Curah Hujan**  
**Luas di**  
**Penelitian**

1	Laelo	1,95
	1.500-2.000 mm/th	
2	Mattiroappareng	2,17
	1.500-2.000 mm/th	
3	Salomenraleng	2,85
	1.500-2.000 mm/th	
4	Tempe	1,70
	1.500-2.000 mm/th	
Lokasi Penelitian		8,67

**dan**  
**Lokasi**

*Sumber : GIS, 2021*

4. Jenis Tanah Jenis tanah yang terdapat di lokasi penelitian atau di sekitaran danau tempe yaitu jenis tanah entisol, vertisol dan alfisol. Berikut adalah klasifikasi dan luasan jenis tanah di lokasi penelitian :

No	Kelurahan Dan Klasifikasi	Luasan
----	---------------------------	--------

**Tabel 4.9.****Klasifikasi Tanah dan di Lokasi Penelitian**

1	Laelo	1,95
	Vertisol	1,05
	Mattiroappareng	2,17
2	Entisol	0,17
	Vertisol	2,00
3	Salomenralenq	2,85
	Alfisol	0,68
	Vertisol	2,17
4	Tempe	1,70
	Alfisol	0,66
	Entisol	0,15
	Vertisol	0,89
Lokasi Penelitian		8,67

**Jenis Luasan**

*Sumber : GIS. 2021*

5. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di sekitar danau tempe terus mengalami peningkatan dan perkembangan berbagai aktivitas manusia. Berdasarkan hasil survei lapangan dan data-data yang di peroleh bahwa penggunaan lahan pada kawasan sekitar danau tempe atau lokasi pencanaan yaitu rawa, sungai, perkebunan, permukiman, hutan, dan tegalan/ladang. Permukiman berkembang pesat dikawasan penelitian atau di sekitar danau tempe walaupun daerah tersebut rawan banjir tetapi masyarakat sudah nyaman untuk berhuni dikawasan sekitar danau tempe tersebut.

**Tabel 4.10.**

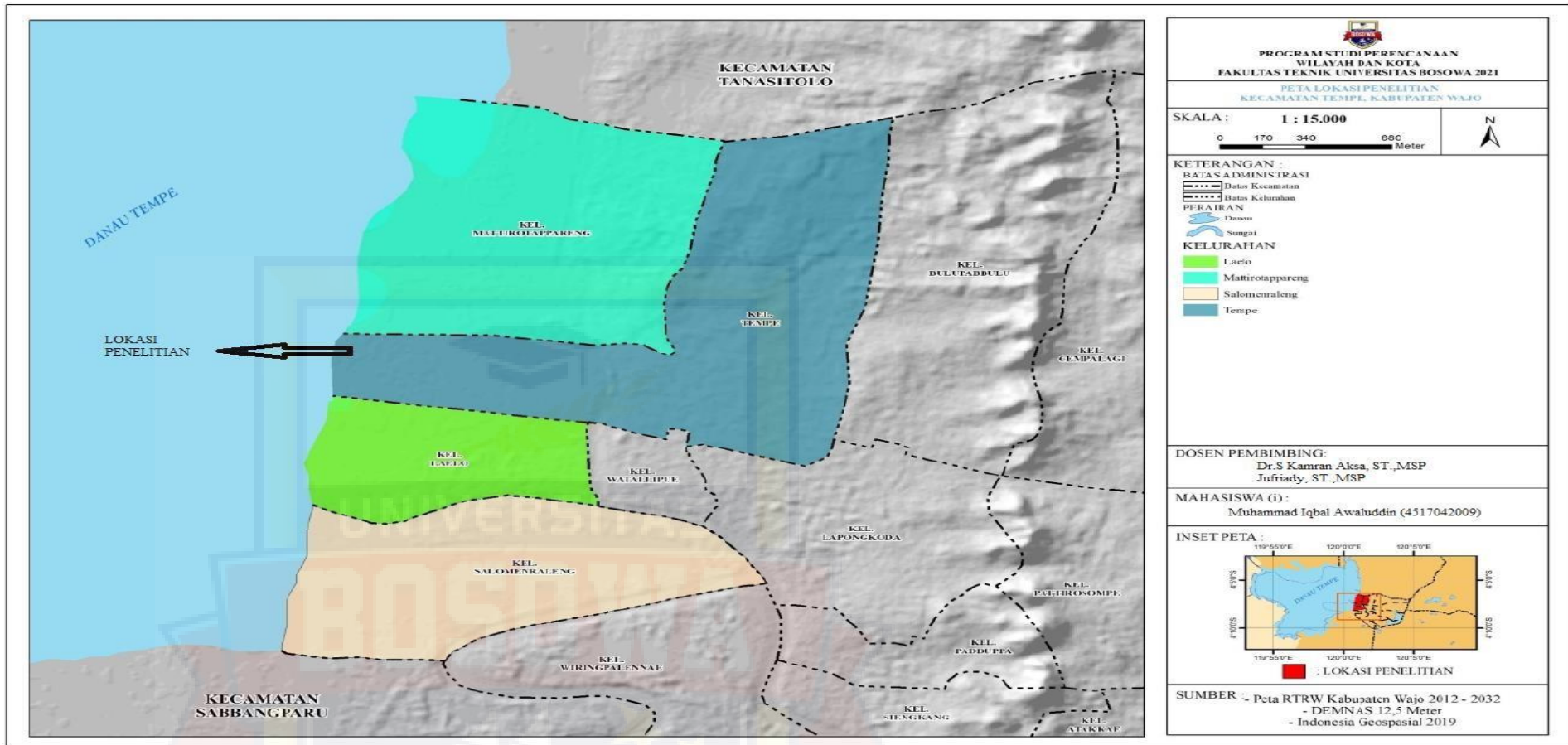
**Penggunaan lahan di Lokasi Penelitian**

No.	Penggunaan Lahan	Luasan
1	Rawa	1,00
2	Sungai	1,77
3	Perkebunan	0,55
4	Permukiman	4,03
5	Hutan	0,13
6	Ladang	1,19
Total		8,67

*Sumber : GIS. 2021*

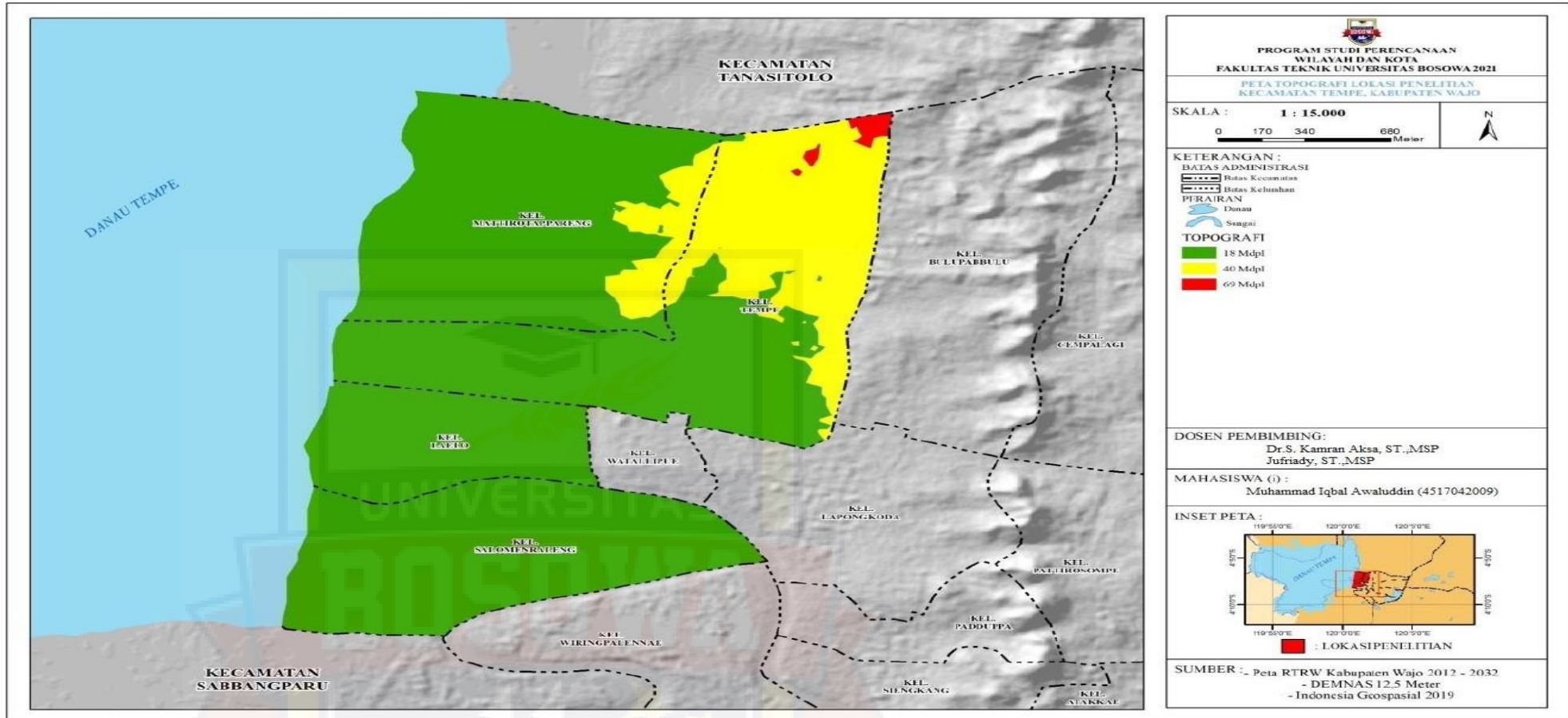
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan yang lebih dominan yaitu permukiman dan yang paling kecil yaitu hutan.

**Gambar 4.5**  
**Peta Lokasi Penelitian**

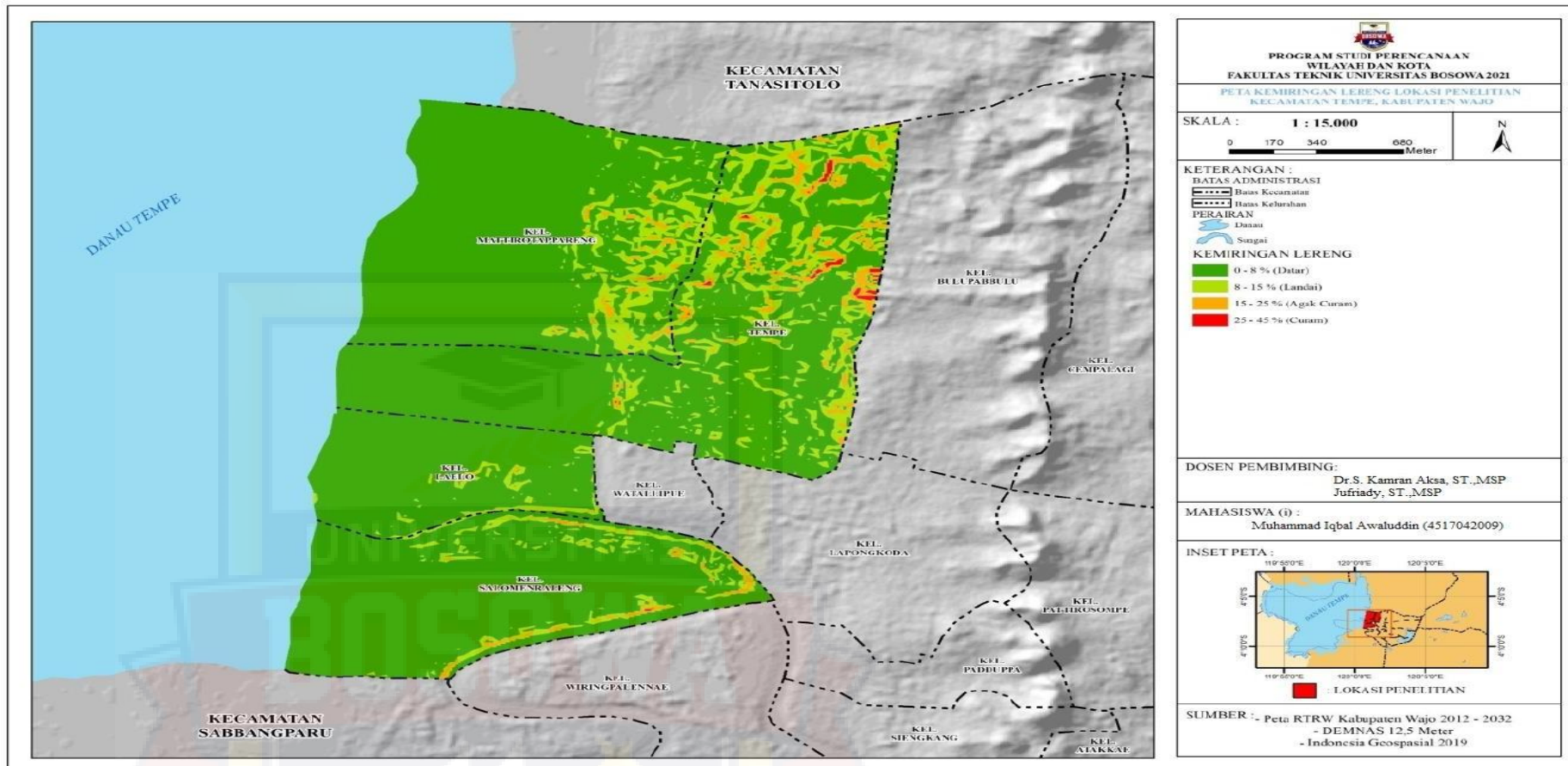




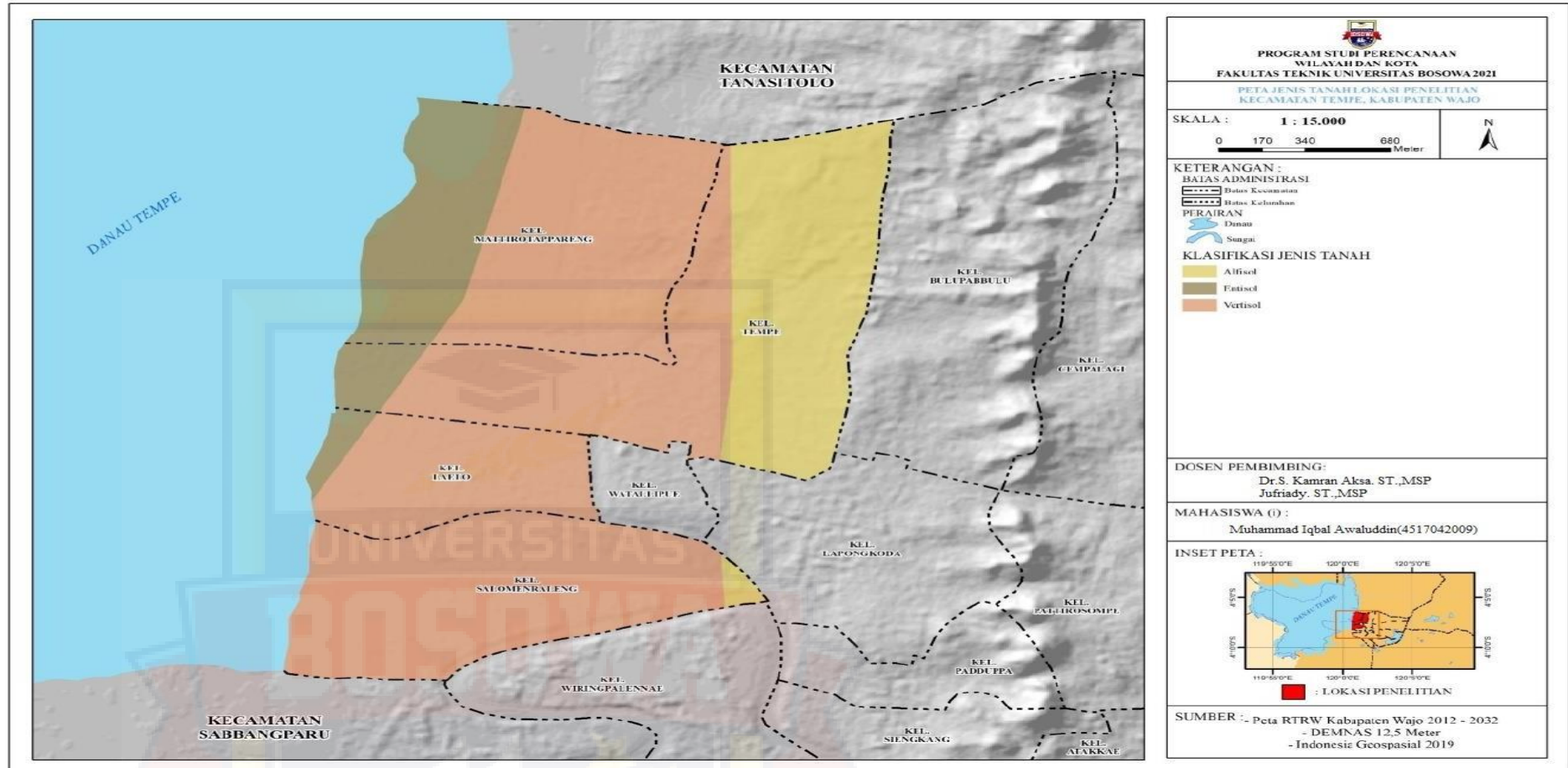
**Gambar 4.6**  
**Topografi Lokasi Penelitian**



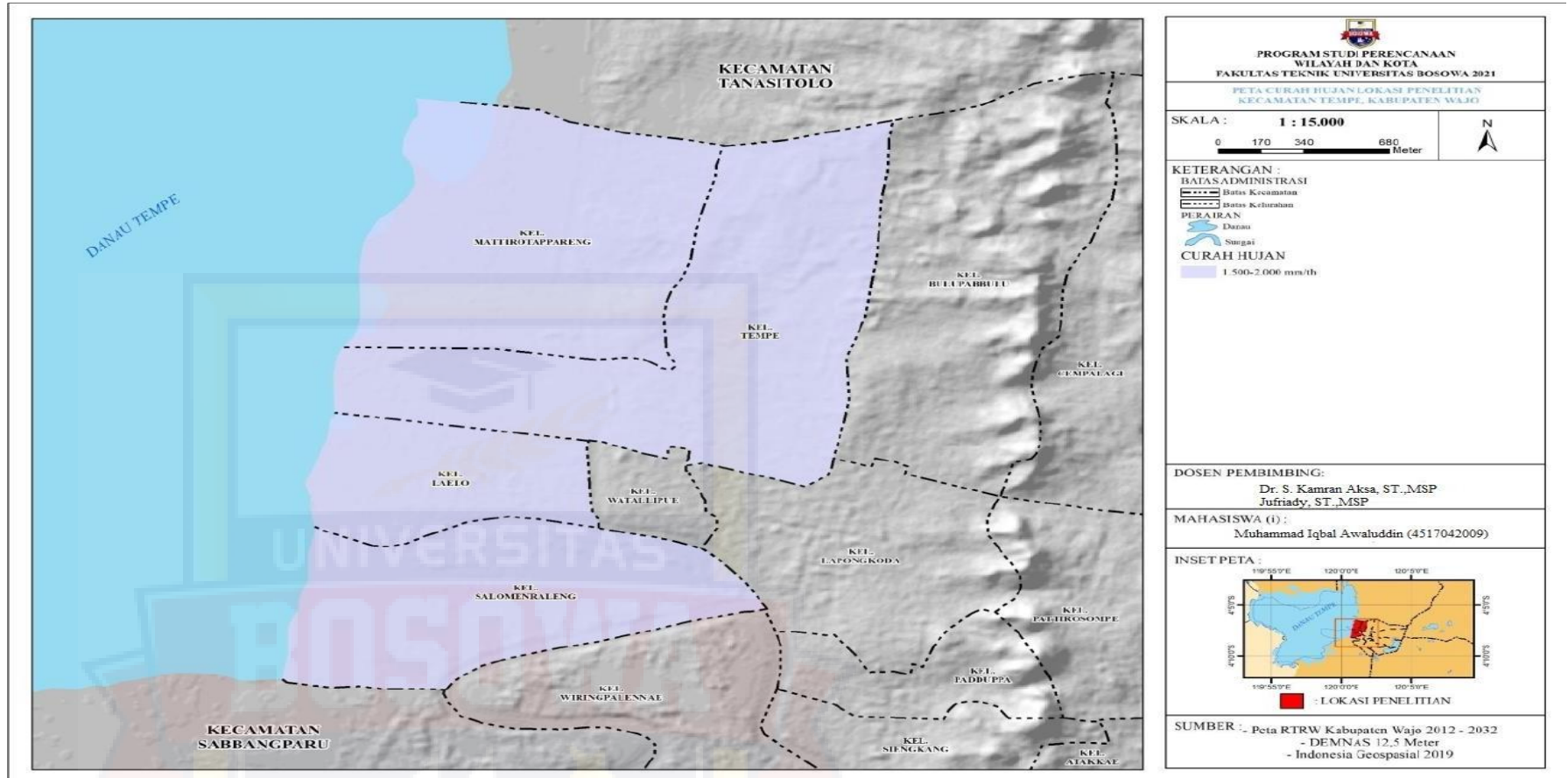
**Gambar4.7**  
**Peta Kemiringan Lereng Lokasi**



**Gambar 4.8**  
**Peta Jenis Tanah Lokasi**

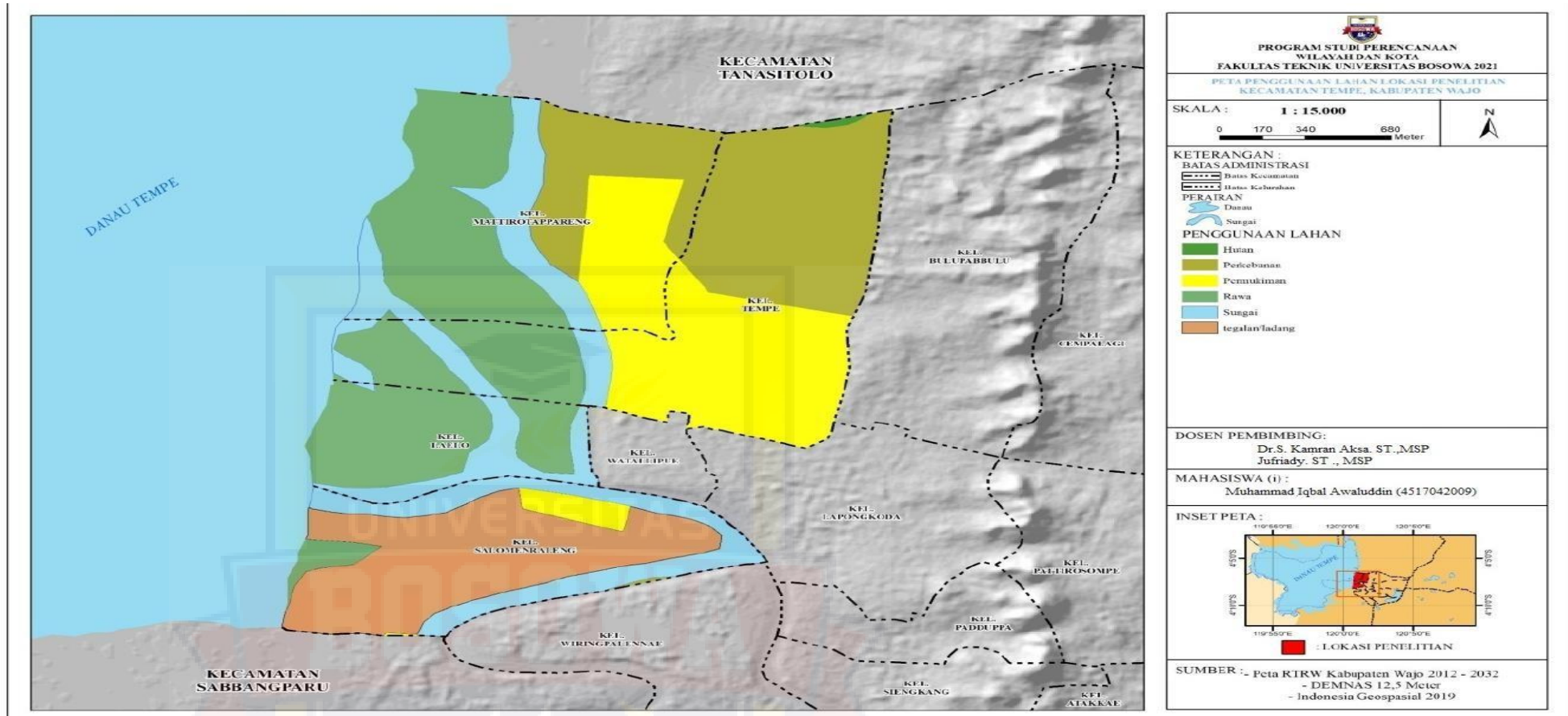


**Gambar 4.9**  
**Peta Curah Hujan**





Gambar 4.10  
Peta Penggunaan L





## **D. Kondisi Aktifitas Masyarakat**

### **a. Permukiman**

Jumlah rumah yang ada di sekitar Danau Tempe (4 wilayah kecamatan) terdapat sebanyak 32.298 unit, dimana rata-rata satu unit rumah dihuni  $\pm 5$  orang. Sahari-harinya aktifitas rumah tangga banyak berhubungan dengan keberadaan Danau Tempe dan sungai-sungai disekitarnya, baik yang bermuara ataupun berhulu di danau. Aktifitas ekonomi masyarakat yang intensitasnya tinggi berupa, pemanfaatan prasarana transportasi air yang menghubungkan desa-desa/tempat-tempat yang ada disekitar danau dan sungai dengan menggunakan perahu motor. Kondisi ini cukup efektif, mengingat beberapa desa/wilayah sekitar danau/sungai masih sulit dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

Aktivitas lain yang banyak memanfaatkan keberadaan Danau Tempe dan sungai-sungai disekitarnya adalah pemanfaatan air danau/sungai sebagai sumber air bersih (mandi, mencuci, dan juga air minum). Untuk rumah tangga yang berlokasi di pinggir danau ataupun sungai, penduduk langsung mencuci dan mandi di tempat tersebut. Sementara untuk yang berlokasi agak jauh, cukup dengan mengambil air melalui pipa-pipa  $\frac{1}{2}$  inci dengan mesin pompa air langsung ke rumah penduduk yang umumnya adalah rumah panggung. Air yang langsung diambil dari danau

atau sungai tersebut, terlebih dahulu ditampung selama lebih dari satu hari dan diendapkan. Hal ini dilakukan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan untuk air minum.

Di sisi lain, banyaknya rumah-rumah yang berlokasi di pinggir danau dan sungai mengakibatkan limbah-limbah rumah tangga baik berupa air buangan rumah tangga maupun sampah-sampah anorganik semuanya terbangun masuk ke dalam danau maupun sungai. Kondisi ini jelas tidak higienis sebab disatu sisi masyarakat setempat memanfaatkan air danau dan sungai sebagai tempat sumber air, namun di sisi lain masyarakat sendiri juga mencemari sumber air tersebut.

b. Usaha Tani

Wilayah sekitar Danau Tempe cukup potensial bagi pengembangan usaha tani, baik itu berupa tanaman pangan maupun tanaman keras (tanaman tahunan). Luas areal tanam jenis tanaman pangan pada tahun 2021 di empat wilayah kecamatan yang berada di sekitar Danau Tempe adalah 28.328 ha, dengan kondisi luas areal panen seluas 20.434 ha atau sebesar 72,3 % dari luas areal tanam. Jenis tanaman pangan yang banyak dibudidayakan penduduk setempat seperti ; padi sawah seluas 20.720 ha dengan luas areal panen 15.413 ha, jagung seluas 3.533 ha dengan luas areal panen 1.611 ha, kacang hijau seluas 3.471 ha dengan luas areal panen 1.913 ha, kedelai



seluas 1.157 ha dengan areal panen 1.074 ha. Sedangkan jenis tanaman pangan yang tidak terlalu banyak dibudidayakan penduduk setempat yakni ubi kayu seluas 114 dengan luas areal panen 86 ha, ubi jalar yang seluas 49 ha dengan luas areal panen 45 ha dan kacang tanah seluas 326 ha dengan luas areal panen 292 ha. Selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4.11  
Luas Areal Tanam Dan Luas Areal Panen

No	Jenis Tanaman	Luas Areal Tanam (Ha)	Luas Areal Panen (Ha)
1	Padi Sawah	20.720	15.413
2	Jagung	3.533	1.611
3	Kacang Tanah	326	292
4	Kacang Hijau	3.471	1.913
5	Kacang Kedelai	1.157	1.074
6	Ubi kayu	114	86
7	Ubi Jalar	49	45
	Jumlah	28.328	20.434

Su

mber : BPS Kabupaten Wajo Tahun 2021

Sementara untuk jenis tanaman keras (tanaman tahunan) seperti kako, cengkeh, kelapa dan sejenisnya juga banyak dikembangkan penduduk setempat. Komoditi ini cukup membantu penduduk setempat dalam menambah pendapatan mereka, terutama komoditi kakao yang setiap minggu dapat dipanen dan dijual.

c. Industri

Jenis kegiatan industri yang ada di wilayah sekitar Danau Tempe di empat kecamatan sesuai dengan golongan industri (isic) dari Deperindag terdapat 4 (empat) golongan yakni :

- 1) Golongan industri makanan , minuman dan tembakau
- 2) Golongan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
- 3) Golongan industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk alat- alat ruah tangga dari kayu
- 4) Golongan industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.

Untuk industri makanan, minuman dan tembakau ada sebanyak 336 unit usaha berupa industri tembakau dan industri makanan (rumah tangga). Sementara golongan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit terdapat sebanyak 4.920 unit usaha berupa industri pertenunan sutra dan industri pakaian jadi. Sedang untuk golongan industri dari kayu, sebanyak 127 unit. Untuk industri kertas, barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan sebanyak 34 unit. Sektor industri pertenunan sutra di wilayah sekitar Danau Tempe merupakan produk unggulan daerah yang sudah sejak lama dikembangkan dan sudah terkenal sampai ke mancanegara, berupa kain sutra asli hasil tenunan tangan penduduk setempat yang proses produksinya dilakukan oleh rumah tangga atau kelompok rumah tangga.

## **E. Adaptasi Masyarakat di Kawasan Danau Tempe Terkait Penggunaan Lahan Pada Pergantian Musim**

Salah satu indikator adanya masalah pada sistem hidrologi di ekosistem Danau Tempe adalah terjadinya banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan merupakan “saudara kembar” yang pemunculannya saling susul menyusul. Faktor penyebab banjir sama persis dengan faktor penyebab kekeringan. Kawasan ekosistem Danau Tempe hampir setiap musim hujan mengalami banjir. Area yang selalu tergenang saat musim hujan adalah di sekitar Danau Tempe, daerah hilir Sungai Bila Sungai Walanae, serta area di sepanjang Sungai Cenranae. Banjir telah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Lahan-lahan pertanian, perumahan penduduk dan infrastruktur sering mengalami kerusakan akibat banjir.

Selama musim hujan, total volume air yang masuk ke danau Tempe lebih banyak dari pada volume air yang keluar ke danau Tempe lewat sungai Cenrana sehingga permukaan air danau Tempe naik akibatnya terjadilah banjir. Luas daerah yang terkena banjir dari tahun ke tahun semakin meluas, karena sungai Cenrana dan muara mengalami pendangkalan dan berkelok-kelok sehingga menghambat aliran air keluar.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat kawasan Danau Tempe pada umumnya melakukan adaptasi terhadap kondisi perairan danau Tempe.

Pada masyarakat nelayan, pola adaptasinya menyesuaikan dengan lingkungan ekosistem perairan dan lingkungan masyarakat disekitarnya. Menurut Bennet dalam Masyhuri dkk (2001) 50 adaptasi merupakan tingkah laku penyesuaian (behavioral adaptation) yang menuju pada tindakan (action). Adaptasi terhadap lingkungan terbentuk dari tindakan yang diulang-ulang dan merupakan bentuk penyesuaian terhadap lingkungan. Tingkah laku yang diulang-ulang ini akan membentuk dua kemungkinan yaitu : pertama, tingkah laku meniru (copying) yang berhasil sebagaimana yang diharapkan, yang kedua tingkah laku meniru ini menjadikan timbulnya penyesuaian individu terhadap lingkungannya (adaptation) atau terjadi penyesuaian keadaan lingkungan pada ciri individu. Keberhasilan dalam strategi adaptasi ini pada gilirannya akan menjadikan kebiasaan masyarakat, yang pada tahap selanjutnya akan menjadi norma sosial.

Perubahan lingkungan di sekitar Danau Tempe akibat adanya perubahan musim merupakan faktor dominan yang menyebabkan masyarakat setempat harus beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dengan pergantian musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dimana pada musim kemarau perairan danau Tempe akan mengalami kekeringan dan pada musim hujan akan mengalami luapan air yang membentuk kubangan air besar. Kedua musim ini berdampak pada kondisi pola kehidupan masyarakat di kawasan Danau Tempe. Pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat

kawasan Danau Tempe dalam menghadapi perubahan musim adalah pertama dengan beralih profesi sebagai nelayan ke petani atau sebaliknya. Kedua adaptasi dengan teknik bermukim pada saat banjir menggenangi wilayah mereka. Proses adaptasi merupakan pola pertahanan dengan kondisi perairan danau Tempe.

Pergantian antara musim kemarau dan musim hujan menandakan pergantian aktivitas masyarakat di kawasan Danau Tempe. Secara tradisional pergantian musim diketahui secara tradisional dengan perkiraan tertentu. Pertama jika pada pertengahan hingga akhir Bulan Juli tahun berjalan suhu udara yang dirasakan masyarakat setempat cenderung dingin (udara pada dini hari) berarti pada awal bulan Agustus mulailah musim hujan, sedangkan untuk pergantian musim hujan dan musim kemarau ditandai dengan suhu udara cenderung panas (malam hari) dan populasi nyamuk bertambah pada akhir bulan November hingga pertengahan Desember, maka pada akhir Desember mulailah masuk musim hujan.

Kedua antara tanggal 21, 22 dan 23 pada bulan Juni tahun berjalan tidak ada hujan maka diprediksi akan terjadi musim kemarau panjang (tidak akan ada hujan kurang lebih 6 bulan) sebaliknya antara tanggal 21, 22, 23 pada bulan Desember hujan sehari penuh selama 3 hari maka diprediksi akan terjadi musim hujan yang menyebabkan luapan banjir.

Ketiga ditandai dengan dilepas atau dipasangnya belle yaitu bilah bambu dengan diameter 1-2 cm yang telah diraut halus yang panjangnya 1,5 meter. Bilah bambu ini kemudian diuntai menjadi pagar bambu sepanjang 1,4 meter perlembar dan ditancapkan hingga ke dasar danau. Ketika belle'yang dipasang mulai terlihat, berarti mulailah musim kemarau, sedangkan jika belle' sudah dilepas maka berakhirilah musim kemarau dan digantikan dengan musim hujan. Sedangkan bentuk adaptasi masyarakat di kawasan Danau Tempe pada perubahan musim dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Peralihan Profesi

Pengetahuan lokal tersebut diatas sudah diketahui secara turun temurun dan menjadi pranata lokal dalam kehidupan masyarakat di kawasan Danau Tempe. Ukuran tersebut selain menandakan pergantian musim juga berarti bahwa sebagian besar masyarakat akan beralih profesi. Dimana pada musim kemarau akan bekerja sebagai petani dan pada musim hujan akan bekerja sebagai nelayan. Proses pergantian profesisangat berhubungan dengan proses perubahan musim yang ditandai dengan ukuran tersebut diatas.

Peralihan profesi yang dilakukan oleh masyarakat di Kawasan Danau Tempe merupakan salah satu cara mereka untuk dapat bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena dampak perubahan lingkungan terutama faktor alam

(perubahan musim). Penentuan perubahan musim oleh masyarakat desa Pallimae masih mengandalkan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun temurun, tradisi ini masih dianggap relevan dengan kondisi perairan danau Tempe saat ini, walaupun kenyataannya kondisi fisik Danau Tempe tidak seperti dulu lagi.

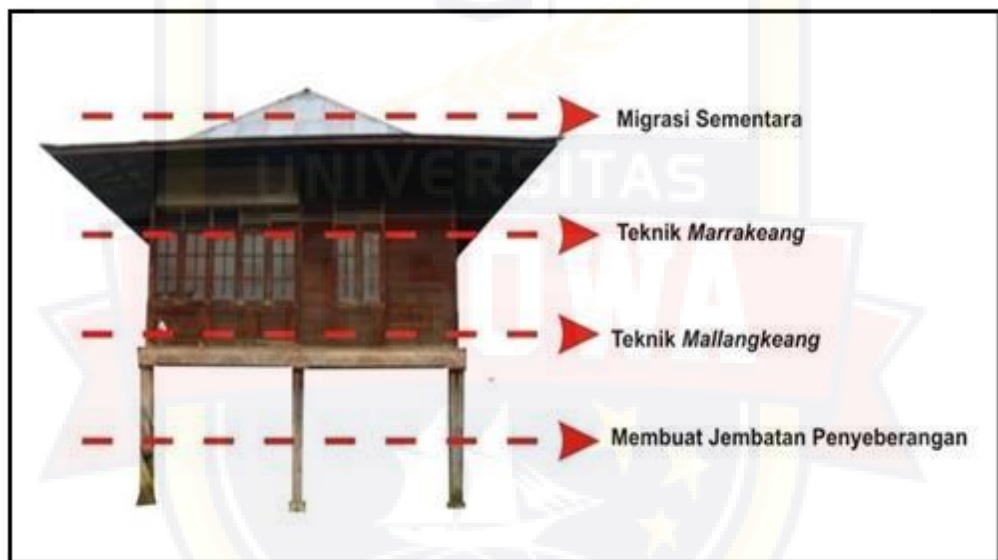
Mengubah profesi dari nelayan ke petani atau sebaliknya harus melakukan persiapan selama kurang lebih 15 hari dan biaya dalam pengadaan atau memperbaharui peralatan. Dengan mengubah profesi ada beberapa konsekuensi yang harus diterima masyarakat setempat berkaitan dengan sumber modal maupun kendala teknis. Sebab antara pekerjaan sebagai petani dan nelayan jauh berbeda.

Beralih profesi dari nelayan ke petani atau sebaliknya pada setiap pergantian musim oleh masyarakat nelayan tradisional kawasan Danau Tempe merupakan sebuah proses agar kebutuhan penghidupan tetap terpenuhi. Bekerja sebagai petani adalah pilihan tepat yang dikondisikan dengan keadaan fisik danau Tempe, dimana pada musim kemarau mengalami kekeringan.

## 2. Perubahan Teknik Bermukim

Selain beradaptasi dengan peralihan profesi, masyarakat di kawasan Danau Tempe juga harus melakukan adaptasi dengan teknik bermukimnya, terutama pada musim hujan, dimana air

akan meluap dan menutupi sebagian besar wilayah kawasan Danau Tempe. Selain mengadopsi bentuk bangunan dengan ciri khas rumah panggung Bugis, dimana bentuk bangunannya lebih berorientasi pada keamanan dan kenyamanan, masyarakat setempat juga mempunyai pola tersendiri dalam beradaptasi dengan kondisi perairan tersebut.



Gambar 4.11 Teknik Bermukim

Dalam menghadapi pergantian musim terutama musim hujan yang menyebabkan banjir, masyarakat Desa Pallimae juga memiliki teknik tersendiri agar tetap bertahan dengan kondisi perairan. Tahap adaptasi dilakukan mulai dari membuat jembatan sementara, mallangkeang, marrakeang hingga mengungsi kerumah kerabat merupakan suatu adaptasi yang



sangat khas oleh masyarakat di Kawasan Danau Tempe. Hal tersebut berarti bahwa antara kehidupan masyarakat dengan perairan Danau Tempe sangat berhubungan erat, mereka tidak akan mengungsi jika air belum mencapai batas tertentu. Proses adaptasi tersebut merupakan salah satu bagian dari proses evolusi dan inovasi kebudayaan. Adapaun evolusi kebudayaan merupakan rangkaian usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap lingkungan fisik danau Tempe yang ekstrim.

Gambar 4.12



Ketinggian Banjir Pada Musim Hujan

Ketinggian air yang tidak stabil mendorong masyarakat harus mengkondisikan keadaan air dengan cepat. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan jemabatan penyeberangan atau langkeang mereka walaupun musim hujan telah berakhir. Hal ini lebih mengefisienkan biaya ketika air kembali menggenangi wilayah mereka ketika musim hujan tiba.

**Gambar 4.13**  
**Adaptasi Masyarakat dengan Membuat Jembatan**  
**Penyeberangan**



Selain rumah penduduk yang diadaptasikan dengan kondisi perairan Danau Tempe, adaptasi juga dilakukan pada fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di Kawasan Danau Tempe. Adaptasi tersebut dilakukan agar fasilitas umum tetap dapat difungsikan baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Bentuk adaptasi yang dilakukan adalah dengan merevitalisasi bentuk bangunan yang menyerupai bentuk rumah penduduk setempat.

3. Biografi Masyarakat Lokal di Kawasan Danau Tempe

Perubahan fisik pada danau Tempe yang terjadi saat ini memberikan dampak besar terhadap masyarakat nelayan setempat dalam mengelola ruang Danau Tempe yang selama ini diwariskan secara turun temurun. Kondisi fisik Danau Tempe yang berubah berangsur-angsur mempengaruhi masyarakat lokal. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena danau Tempe merupakan sumber penghidupan utama mereka. Proses perubahan Danau Tempe nyata-nyata memberikan pengaruh terhadap masyarakat setempat dalam mengelola ruang

perairan. Pemahaman mereka akan perubahan tersebut, pola pemanfaatan secara tradisional yang mengalami inovasi sehingga mampu mengimbangi perubahan pada Danau Tempe.

Berdasarkan survei langsung di lapangan, peneliti mewawancarai seorang informan dari kalangan nelayan. Biografi singkat informan dideskripsikan dan dianalisis. Berikut ini adalah ilustrasi dari informan yang telah diwawancarai:

Biografi Singkat Ambo Dalle

Informan dari Nelayan Pakkaja Lalla

AD lahir di Dusun Salotengnga Desa Tempe pada tahun 1958, 65 Tahun yang lalu. AD adalah penduduk asli Desa Tempe dan merupakan keturunan nelayan. Hingga saat ini AD bekerja sebagai nelayan dengan status sebagai pakkaja lalla. Pengetahuan tentang mencari ikan di danau didapatkan dari bapaknya yang juga seorang nelayan semasa hidupnya. Menurut AD sejak kecil dia dan 3 saudaranya diajarkan tentang teknik makkaja (mencari ikan) secara tradisional. Berbagai pengetahuan dari ayahnya kini dipraktikkan bersama saudara.saudaranya. Saat ini AD sudah berkeluarga dan dikaruniai dengan 5 orang anak. Pendidikan terakhir AD adalah SMP, dia tidak melanjutkan ke tingkat selanjutnya karena akses ke SMA terdekat sangat jauh. Tetapi sejak memiliki anak dia sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Penghasilan AD sebagai

pakkaja lalla tidak menentu, antara 30.000-100.000 perhari jika wettu pabosi (musim hujan) saat populasi ikan meningkat, tetapi jika musim kemarau AD tidak makkaja dan memilih bertani di kebun miliknya. Hal ini umumnya juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pallimae jika musim kemarau tiba.

Sejak tahun 1970 dia mulai bekerja sebagai nelayan hingga sekarang. Seperti halnya nelayan Desa Tempe pada umumnya, AD juga memiliki kalampang (rumah terapung) di danau Tempe selain memiliki rumah di daratan Saolenggae. Kalampang miliknya dibuat pada tahun 1977 dan tiap 3 tahun sekali AD merevitalisasi kalampang miliknya dengan mengganti material yang baru. Setiap hari jumat siang, selepas shalat juma'at AD mulai turun ke danau menuju kalampang miliknya. Selama 7 hari dia akan tinggal di danau, tetapi 1 kali selama 2 hari dia kembali ke darat untuk menjaul hasil tangkapannya. Jika tangkapan lebih maka semakin sering dia ke darat. Pada Kamis siang AD kembali ke rumahnya di darat, sesuai aturan setempat pantang menangkap ikan pada Kamis siang hingga selepas Jum'at, karena dinilai pada hari Jum'at merupakan hari berkembang biaknya ikan seklaigus memberikan kesempatan kepada nelayan untuk shalat Jum'at. Hal ini sejalan karena tidak tersedianya mushallah atau mesjid terapung di danau.

Menurut AD kondisi Danau Tempe memang tidak seperti dulu lagi, ketika musim kemarau tiba air danau sangat dangkal kira-kira hanya sampai batas lutut orang dewasa dan air tidak sampai  $\frac{3}{4}$  dari panjang tiang pacco balanda, sebaliknya jika musim hujan air danau meluap hingga ke daratan Desa Pallimae biasaya air akan sampai pada ujung tiang pacco balanda. Pada saat musim kemarau nelayan lebih banyak bekerja sebagai petani, karena jumlah tangkapan sangat kurang. Lahan-lahan kering yang terbentuk biasanya menjadi sengketa bagi sebagian nelayan disini, terutama nelayan pabungka dan paccapeang, karena ada kecenderungan menguasai lahan secara pribadi. Area yang masuk wilayah bungka pada musim hujan akan diklaim oleh pabungka pada musim kemarau untuk dijadikan wilayah pertanian. Pada musim penangkapan ikan, dimana sebageaian besar wilayah danau akan terlihat rangkaian bangunan bungka.

Gambar 4.14

Dekomentasi Bersama Ambo Dalle



Berdasarkan kasus tersebut diatas, dapat diinterpretasi bahwa pertama, dilihat dari asal usulnya AD

merupakan keturunan nelayan. Dimana pengetahuan tentang menangkap ikan secara tradisional (teknik makkaja) diwariskan secara turun temurun oleh ayahnya. Menurut Berkes52 traditional ecological knowledge atau kearifan lingkungan adalah kumpulan (a cumulative body) pengetahuan, praktik dan keyakinan (belief) yang berkembang melalui proses adaptasi dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui saluran atau transmisi budaya berkaitan dengan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal masyarakat nelayan tradisional merupakan suatu budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi yang telah dipraktikkan sebagai bagian dalam pengelolaan sumberdaya alam di Danau Tempe.

Pemanfaatan ruang danau Tempe secara tradisional dikembangkan dari pengalaman selama bertahun-tahun dan disesuaikan dengan lingkungan danau Tempe yang disampaikan secara lisan dalam bentuk cerita, lagu, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum adat, bahasa lokal dan praktek-praktek yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam danau Tempe. Kearifan lokal masyarakat nelayan danau Tempe pada dasarnya merupakan code of product yang bersifat unik dan dimiliki serta dikembangkan oleh sekelompok nelayan tradisional atau indigeneous people yang hanya dapat ditemukan di Kawasan Danau Tempe dengan karakter khas mereka.

Kedua perubahan kondisi perairan danau Tempe menyebabkan AD beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Pada musim hujan AD masih berstatus sebagai nelayan tetapi pada musim kemarau AD memilih bekerja sebagai petani. Dapat diinterpretasi bahwa masyarakat nelayan tradisional melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut untuk tetap bertahan hidup, terlebih saat ini perubahan luasan yang drastis antara musim kemarau dan musim hujan. Aktivitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi lingkungan danau Tempe, karena akumulasi unsur-unsur yang mengandung peptisida akan terlarut pada musim hujan.

Ketiga, masyarakat nelayan tradisional danau Tempe memiliki ukuran atau parameter tersendiri dalam menilai terjadinya perubahan fisik danau Tempe. Parameter tersebut adalah tiang pacco balanda yang ditancapkan pada tengah danau. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat nelayan tradisional memahami terjadinya perubahan tersebut selain dilihat dari penurunan hasil tangkapan mereka pada musim hujan.

Keempat, saat ini pemanfaatan ruang danau secara tradisional pada wilayah penangkapan atau fishing ground didominasi oleh pemanfaatan oleh nelayan pabungka. Sehingga nelayan lainnya terutama nelayan pakkaja lalla



mengalami kesulitan karena terhalang oleh bungka. Hal tersebut berarti bahwa dalam pemanfaatan ruang danau secara tradisional sudah mulai mengalami pergeseran. Dimana secara adat diyakini bahwa zona makkaja merupakan pranata lokal dalam menghindari terjadinya pemanfaatan secara pribadi. Tetapi saat ini pranata lokal tersebut sudah mulai ditinggalkan, akibatnya dapat dinilai bahwa telah terjadi ego spasial antar nelayan danau Tempe dalam memanfaatkan ruang danau tempe baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. maupun pada musim hujan.

Kelima, simbolisasi jenis burung tertentu dalam menentukan banyaknya ikan di dalam danau, saat ini tidak dapat lagi diterapkan oleh AD, karena populasi jenis burung-burung tersebut sudah mengalami penurunan. Menurunnya populasi jenis burung-burung tertentu merupakan dampak dari terjadinya perubahan fisik yang menyebabkan rusaknya habitat burung-burung tersebut. Hal ini berarti bahwa terjadinya perubahan fisik mempengaruhi simbolisasi masyarakat nelayan tradisional yang selama ini diterapkan.

## **F Analisis Pembobotan**

Metode pembobotan (faktor skoring) merupakan suatu teknik dalam menganalisis data dengan membuat suatu nilai terhadap keadaan yang ada, dan disusun menurut ranking yang telah dibuat sebelumnya. Variabel yang akan dinilai sesuai dengan variabel yang telah ditentukan



pada bab II yaitu variabel tentang Penggunaan Lahan Di Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan gaya sentrifugal yaitu mendorong kegiatan berpindah dari kawasan (pusat kota) ke wilayah pinggiran dan gaya sentripetal bekerja menahan fungsi- fungsi tertentu pusat kota dan menarik fungsi lainnya ke dalamnya.

#### 1. Hasil Penilaian Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Lahan Di Kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo.

Penilaian faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan meliputi 5 (lima) variabel yaitu aksesibilitas, tapak, sosial budaya, sedangkan berdasarkan Aspek Fisik yaitu , aspek sosial, aspek kependudukan, aspek sarana, aspek prasarana dan aspek tapak.

Penilaian faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan variabel aksesibilitas terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu moda angkutan, kondisi jalan, waktu tempuh, jarak. Variabel tapak terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Potensi Kawasan, Aksesibilitas, Dan Luas Lahan.

Variabel fungsional terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu permukiman, pertanian, perikanan, perdagangan. Penilaian faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan berdasarkan variabel aspek fisik terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu topografi, ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan, daya tampung ruang

##### A. Gaya Sentrifugal

## 1) Penilaian Aksesibilitas

Aksesibilitas yaitu kemudahan pencapaian untuk melakukan aktivitas pada suatu daerah, baik secara internal maupun eksternal kawasan perkotaan. Adapun indikator yang terkait dengan aspek aksesibilitas tersebut adalah :

### (a) Moda Angkutan

Moda Angkutan yaitu adanya sarana transportasi yang dapat melayani atau digunakan oleh masyarakat pada suatu kawasan, baik dari segi jumlah maupun jenis sarana transportasi yang digunakan.

### (b) Kondisi Jalan

Kondisi jalan yaitu infrastruktur utama pada suatu kawasan permukiman. Fungsi utama jalan antara lain sebagai prasarana transportasi yang berperan penting bagi segala aspek kehidupan, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan dan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Kondisi Jalan di wilayah penelitian secara umum bermaterial aspal, beton dan paving blok dengan kondisi dominan baik dan rusak ringan. Sebagian besar jalan di kawasan permukiman telah dilengkapi drainase.

#### (c) Waktu Tempuh

Waktu tempuh yaitu Waktu perjalanan adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan untuk melewati ruas jalan dengan panjang tertentu termasuk semua hambatan perjalanan (detik/smp). Waktu tempuh dapat juga di artikan waktu yang diperlukan sesuai dengan karakteristik gerakan kendaraan secara nyata diatas jalan, dimana kondisinya di suatu lajur jalan tidak hanya terdapat satu kendaraan saja.

#### (d) Jarak

Adalah jarak yang di tempuh dalam suatu perjalanan baik menggunakan kendaraan maupun jalan kaki ketempat tujuan dengan memperhitungkan waktu tertentu.

## 2) Penilaian Tapak

Tapak adalah sebidang lahan atau sepetak tanah dengan batas-batas yang jelas, berikut kondisi permukaan dan ciri-ciri istimewa yang di miliki oleh lahan tersebut. Sebuah tapak tidak pernah tidak berdaya tetapi merupakan sekumpulan jaringan yang sangat aktif yang terus berkembang yang jalin menjalin dalam perhubungan-perhubungan. Perencanaan tapak adalah pengolahan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Perencanaan tapak dilakukan dengan memperhatikan kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atasnya. Tujuan dari

perencanaan tapak adalah agar keseluruhan program ruangdankebutuhan-kebutuhannya dapat diwujudkan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi, lingkungan alam, lingkungan fisik buatan dan lingkungan social disekitarnya.

(a) Harga Lahan

Harga lahan ditentukan oleh kemampuan lahan tersebut secara kualitatif maupun strategis dalam penggunaannya, misalnya untuk kegiatan fungsional tertentu. Secara teoritis harga ekonomis lahan perkotaan akan semakin tinggi jika lokasinya mendekati kawasan pusat kota. Karena pada umumnya semakin mendekati pusat kota akan semakin tinggi aksesibilitas terhadap fasilitas. Sebaliknya semakin jauh dari pusat kota nilai lahan perkotaan akan semakin berkurang.

(b) Status Lahan

Status Lahan adalah perbandingan jumlah rumah yang dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai perumahan dibandingkan dengan yang dibangun pada tanah yang diperuntukkan bagi perumahan.

(c) Penguasaan Bangunan

Penguasaan Bangunan adalah status kepemilikan dan penggunaan bangunan. Teknik penilaiannya dengan membandingkan jumlah KK yang menempati bangunan dengan cara sewa/kontrak dengan jumlah seluruh KK.

(d) Frekuensi Bencana Banjir

Frekuensi bencana banjir adalah banyaknya kejadian bencana banjir pada suatu permukiman. Frekuensi bencana banjir dinilai dari banyaknya kejadian selama satu tahun, pada satu wilayah

3) Penilaian Sosial Budaya

Sosial budaya yaitu unsur penting komponen kebudayaan karena adanya sistem norma sosial itulah masing-masing anggota masyarakat untuk saling kerja sama dan menyesuaikan diri dengan alam lingkungan sekelilingnya untuk kelanggengan kehidupannya.

(a) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

(b) Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah tempat terjadinya sebuah interaksi suatu sistem dalam menghasilkan sebuah kebudayaan yang terkait oleh norma-norma dan adat istiadat yang berlangsung dalam kurung waktu yang lama.

(c) Perilaku Sosial Masyarakat

Perilaku sosial masyarakat adalah kegiatan-kegiatan sosial di lapangan, yang artinya adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

(d) Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Dalam struktur masyarakat, orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan di tempatkan lebih tinggi di bandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah.

5) Penilaian Fungsional

Fungsional adalah konsentrasi satu fungsi di pusat kota yang bekerja sebagai magnet kuat yang menarik fungsi lainnya Penilaian fungsional

(a) Permukiman

Permukiman yaitu orientasi permukiman kearah jalan, sungai ataupun danau. Hal ini di maksud untuk mempermudah akses ke jalan ataupun tempat kerja. Sehingga pada kawasan ini umumnya akan di jumpai pola-pola permukiman yang berderet secara linier mengikuti garis jalan atau garis sungai. Pola permukiman linier sepanjang danau ini terbentuk karena adanya ketergantungan masyarakat akan fungsi sungai/danau yaitu sebagai tempat mencari nafkah, sebagai sarana transportasi air dan

tempat melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci dan kebutuhan akan air minum.

(b) Pertanian

Wilayah kawasan Danau Tempe cukup potensial bagi pengembangan pertanian, baik itu berupa tanaman pangan maupun tanaman keras (tanaman tahunan).

(c) Perikanan

Perikanan yang ada di Kawasan Danau Tempe adalah nelayan ikan. Setiap hari masyarakat nelayan dipermukiman mengapung disibukkan oleh aktifitas menangkap ikan dan memproses ikan basah menjadi ikan kering. Pekerjaan masyarakat ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi air danau yang sering mengalami pasang surut. Pada saat air pasang atau kondisi danau masih tergenang air, maka paranelayan akan melakukan pekerjaan menangkap ikan, tapi pada saat air danau surut, maka paranelayan beralih menjadi petani palawija pada lahan danau yang mengering. Keberadaan Danau Tempe sangat berpengaruh tempat mencari nafkah hingga sebagai tempat bertransportasi dengan menggunakan perahu.

(d) Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan atau transaksi jual beli barang antara konsumen dengan penjual, dengan menggunakan uang sebagai alat alat pembayaran dalam perdagangan modern. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan perkotaan yang memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota.

b. Gaya Sentripetal

1) Penilaian Aspek Fisik

Aspek fisik yaitu suatu kondisi alamiah yang dimiliki suatu kawasan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan permukiman dan menjadi aspek penting dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur lingkungan permukiman. Adapun indikator yang terkait dengan aspek fisik tersebut adalah:

(a) Topografi

Topografi, yaitu suatu bentang alam menurut ketinggian dan kemiringan lahan yang dapat dijadikan suatu kawasan permukiman dengan segala infrastruktur penunjangnya.

(b) Ketersediaan lahan



Ketersediaan lahan, maksudnya adalah apakah masih terdapat lahan untuk dapat dikembangkan terkait dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur kota, apakah merupakan lahan produktif atau non produktif, apakah diperuntukkan untuk budidaya atau non budidaya dan sebagainya.

#### (c) Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan, maksudnya adalah untuk melihat tingkat kemampuan lingkungan dalam mengakselerasikan jenis dan jumlah kegiatan diatas suatu lahan, termasuk potensi-potensi fisik lingkungan yang dimiliki suatu kawasan tertentu.

#### (d) Daya Tampung Ruang

Daya tampung ruang, yaitu kemampuan suatu lahan atau kawasan untuk dikembangkan menurut jumlah bangunan dan penduduknya serta infrastrukturnya.

### 2) Penilaian Aspek Sosial

Aspek Sosial, yaitu kondisi nilai-nilai kemasyarakatan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan lingkungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Adapun indikator yang terkait dengan aspek sosial tersebut adalah :

(a) Sistem Sosial

hubungan antar masyarakat yang terjalin pada suatu kawasan, baik antara individu dan individu maupun antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Hubungan tersebut dapat bersifat negative ataupun bersifat positif atas pengembangan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan

(b) Struktur Sosial

Merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok, kelas sosial, nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial.

(c) Tingkat Pendidikan

Dilihat dari prosentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat pendidikan dasar sembilan tahun (hingga setingkat SLTP). Teknik penilaian adalah membandingkan jumlah penduduk yang tidak tamat pendidikan dasar sembilan tahun dengan keseluruhan jumlah penduduk dikalikan 100%

(d) Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

### 3) Penilaian Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Berikut indikator dalam variabel aspek kependudukan :

#### (a) Jumlah Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada satu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 100 penduduk. Teknik penilaiannya adalah membandingkan jumlah penambahan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan dengan 100.

#### (b) Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas wilayah

administrasi tertentu. Teknik penilaiannya adalah membandingkan banyaknya penduduk dengan luas wilayah administrasi kelurahan (Ha)

(c) Tingkat pertumbuhan penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada satu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 100 penduduk. Teknik penilaiannya adalah membandingkan jumlah penambahan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan dengan 100.

(d) Urbanisasi dan migrasi

Urbanisasi adalah persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota.

4) Penilaian Aspek Sarana

Aspek sarana yaitu kemampuan suatu sarana tertentu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun indikator yang terkait dengan aspek sarana tersebut adalah:

(a) Ketersediaan Sarana Fasos dan Fasum

Adalah adanya sarana fasilitas sosial dan umum yang dapat melayani atau digunakan oleh masyarakat pada suatu kawasan, baik dari segi jumlah maupun jenis sarana sosial dan sarana umum yang digunakan.

(b) Jenis Sarana

Adalah kemampuan suatu sarana tertentu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

(c) Besarnya Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah ruang yang sangat berkorelasi dengan kondisi lingkungan semakin banyak proporsi ruang terbuka pada suatu lingkungan permukiman maka lingkungan tersebut makin baik. Teknik penilaiannya adalah membandingkan luas ruang terbuka dengan luas keseluruhan lingkungan permukiman dikalikan 100%.

(d) Kondisi Sanitasi Lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan di kawasan ini sangat buruk sebagian besar penduduk tidak memiliki kamar mandi (WC) sendiri di rumah. Kegiatan buang air besar biasanya dilakukan di sungai ataupun di WC darurat yang di bangun sangat sederhana dibagian samping atau belakang rumah. Ketidak mampuan membangun WC sendiri di rumah karena

kemiskinan dan kondisi rumah yang sering banjir. Kamar mandi/ WC ini akan tersumbat dan tidak akan di fungsikan lagi pada musim kemarau.

#### 5) Penilaian Aspek Prasarana

Aspek prasarana yaitu kemampuan suatu prasarana tertentu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun indikator yang terkait dengan aspek prasarana tersebut adalah:

##### (a) Pelayanan Jaringan Jalan

Penilaian jaringan jalan adalah membandingkan panjang jalan yang baik, sedang, rusak dan rusak berat dengan jumlah total panjang jalan di kali 100%.

##### (b) Pelayanan Air Minum

Pelayanan air minum pada kawasan ini umumnya hanya mengendalikan air sungai dan sumur dalam. Terutama pada kawasan Danau Tempe tidak terjangkau PDAM kecuali di Kecamatan Tempe. Kondisi air sungai yang keruh dan kotor sepanjang tahun karena adanya aktivitas jamban dan mencuci/memandikan ternak di sungai menyebabkan kualitas air sungai tidak layak untuk di konsumsi.

##### (c) Pelayanan Persampahan

Sistem pelayanan persampahan di kawasan ini belum di kelola dengan baik. Hasil survey menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki tempat penampungan sampah khusus di setiap rumah. Sampah yang berasal dari rumah tangga baik sampah padat maupun cair, umumnya dibuang di sungai, di tampung di pinggir jalan, lahan- lahan kosong atau di bakar. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan oleh pemerintah di setiap lingkungan kendalanya adalah jarak yang jauh dari rumah dan tidak adanya alat angkut khusus ke TPS tersebut.

#### (d) Ketersediaan Drainase

Drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase yang ada umumnya merupakan drainase terbuka dan menerus. Terdiri dari drainase alami berupa sungai dan kanal, serta drainase buatan yang ditujukan untuk mengalirkan limbah rumah tangga dan air hujan saat banjir. Namun di beberapa tempat dalam kondisi tersumbat oleh sampah ataupun tanah, sehingga drainase tidak berfungsi optimal.

#### 6) Penilaian Aspek Tapak

Tapak adalah sebuah proses pemahaman akan kualitas-kualitas tapak yang dimiliki, faktor-faktor yang menentukan suatu karakter tapak, maksud yang terkandung dalam tiap faktor, lokasi masing-masing faktor dan mengategorikan tiap faktor dalam proses perencanaan. Adapun indikator dari variabel tapak sebagai berikut :

(a) Status Tanah

Status Tanah adalah perbandingan jumlah rumah yang dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai perumahan dibandingkan dengan yang dibangun pada tanah yang diperuntukkan bagi perumahan, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Teknik penilaiannya adalah membandingkan luas permukiman yang berada pada peruntukan bukan perumahan dengan luas seluruh permukiman.

(b) Harga Lahan

Harga lahan ditentukan oleh kemampuan lahan tersebut secara kualitatif maupun strategis dalam penggunaannya, misalnya untuk kegiatan fungsional tertentu. Secara teoritis harga ekonomis lahan perkotaan akan semakin tinggi jika lokasinya mendekati kawasan pusat kota. Karena pada umumnya semakin mendekati pusat kota akan semakin tinggi aksesibilitas terhadap fasilitas. Sebaliknya semakin jauh dari pusat kota nilai lahan perkotaan akan semakin berkurang..

(c) Status Penguasaan Bangunan



Adalah status kepemilikan dan penggunaan bangunan. Teknik penilaiannya dengan membandingkan jumlah KK yang menempati bangunan dengan cara sewa/kontrak dengan jumlah seluruh KK.

(d) Frekuensi Bencana Banjir

Adalah banyaknya kejadian bencana banjir pada suatu permukiman. Frekuensi bencana banjir dinilai dari banyaknya kejadian selama satu tahun, pada satu wilayah.

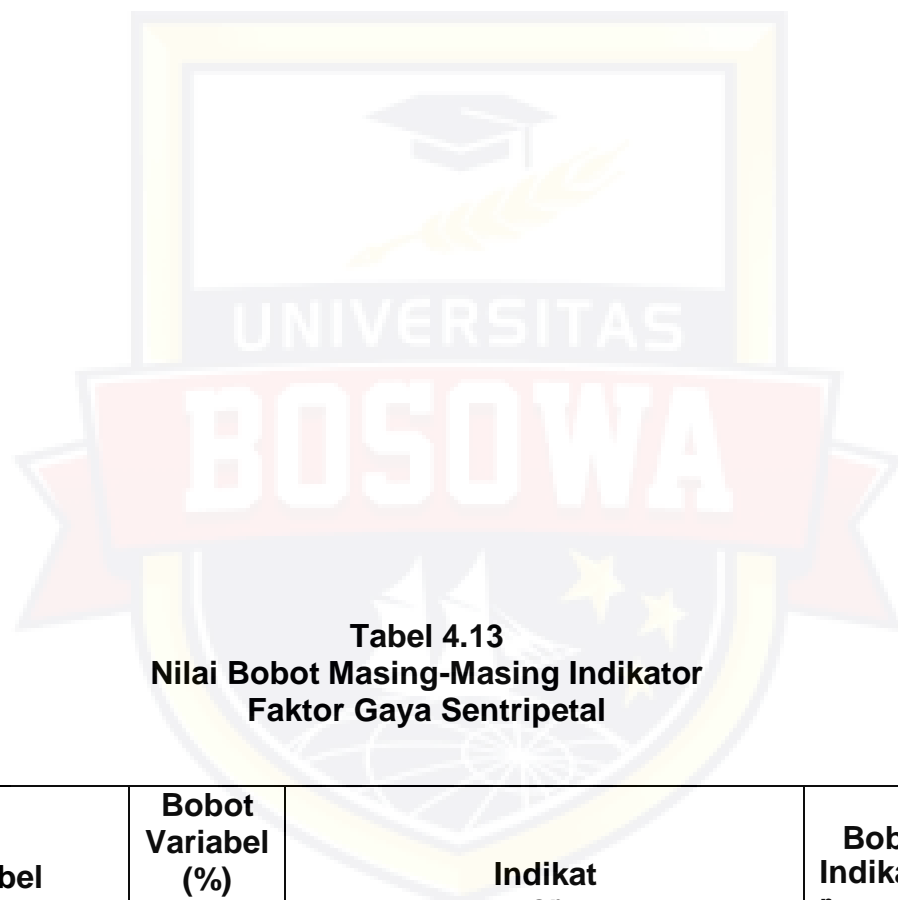
2. Nilai Bobot Masing-Masing Indikator

Nilai bobot masing-masing indikator didasarkan pada prioritas masing-masing variabel yang dinilai. Untuk mendapatkan bobot penilaian masing-masing indikator di Kawasan Danau Tempe dan sekitarnya maka cara yang digunakan yaitu bobot indikator dikalikan dengan bobot variable dibagi dengan 100% sehingga diperoleh hasil bobot penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai bobot masing-masing indikator pada perubahan penggunaan lahan Danau Tempe dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.12**  
**Nilai Bobot Masing-Masing Indikator**  
**Faktor Gaya Sentrifugal**

No	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator	Bobot Penilaian	
1	Aksesibilitas	20	1	Moda Angkutan	30	6
			2	Kondisi Jalan	30	6
			3	Waktu Tempuh	20	4
			4	Jarak	20	4
2	Tapak	15	1	Harga Lahan	30	4.5
			2	Status Lahan	30	4.5
			3	Penguasaan Bangunan	20	3
			4	Frekuensi Bencana Banjir	20	3
3	Sosial Budaya	25	1	Partisipasi Masyarakat	25	6.25
			2	Lingkungan Masyarakat	25	6.25
			3	Prilaku Sosial Masyarakat	25	6.25
			4	Interaksi Sosial	25	6.25
4	Status Hunian	15	1	Jumlah Penduduk	25	3.75
			2	Menetap	25	3.75
			3	Numpang	25	3.75
			4	Jumlah KK setiap	25	3.75

				rumah		
5	Fungsional	25	1	Permukiman	25	6.25
			2	Pertanian	25	6.25
			3	Perikanan	25	6.25
			4	Perdagangan	25	6.25



**Tabel 4.13**  
**Nilai Bobot Masing-Masing Indikator**  
**Faktor Gaya Sentripetal**

No.	Variabel	Bobot Variabel (%)	Indikator	Bobot Indikator	Bobot Penilaian	
1	Aspek Fisik	20	1	Topografi	20	4
			2	Ketersediaan Lahan	20	4
			3	Daya Dukung Lingkungan	30	6
			4	Daya Tampung Ruang	30	6
2	Aspek Sosial	20	1	Sistem Sosial	30	6
			2	Struktur Sosial	30	6
			3	Tingkat Pendidikan	20	4
			4	Tingkat Pengangguran	20	4
3	Aspek Kependudukan	10	1	Jumlah Penduduk	20	2
			2	Kepadatan Penduduk	30	3
			3	Tingkat Pertambahan Penduduk	30	3
			4	Urbanisasi dan Migrasi	20	2

4	Aspek Sarana	20	1	Ketersediaan Sarana Fasos dan Fasum	30	6
			2	Jenis Sarana	20	4
			3	Besarnya ruang terbuka	20	4
			4	Kondisi sanitasi Lingkungan	30	6
5	Aspek Prasarana	20	1	Pelayanan Jaringan Jalan	30	6
			2	Pelayanan Air Minum	30	6
			3	Pelayanan Persampahan	20	4
			4	Ketersediaan Drainase	20	4
6	Aspek Tapak	10	1	Status Tanah	30	3
			2	Harga Lahan	30	3
			3	Status Penguasaan Bangunan	20	2
			4	Frekuensi Bencana Banjir	20	2

Keterangan Bobot Indikator :

30% = Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan penggunaan

lahan 25% = Besar pengaruhnya terhadap perubahan penggunaan lahan

20% = Cukup besar pengaruhnya terhadap perubahan penggunaan

lahan 15% = Kurang besar pengaruhnya terhadap perubahan

penggunaan lahan 10% = Tidak besar pengaruhnya terhadap perubahan

penggunaan lahan

### 3. Nilai Tertimbang

Nilai tertimbang adalah hasil perkalian antara nilai kategori dengan nilai

bobot hasil penilaian terhadap faktor yang mempengaruhi penggunaan

lahan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil penilaian nilai

tertimbang tingkat faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan Danau

Tempe dan sekitarnya :

**Tabel 4.14**

**Nilai Tertimbang Masing-Masing Indikator  
Faktor Gaya Sentrifugal**

No.	Variabel	Kategori	Bobot Hasil Penilaian	Nilai Tertimbang
1	Aksesibilitas	3 Sedang	6	18
		3 Sedang	6	18
		3 Sedang	4	12
		3 Sedang	4	12
2	Tapak	1 Rendah	4.5	4.5
		3 Sedang	4.5	13.5
		3 Sedang	3	9
		5 Tinggi	3	15
3	Sosial Budaya	1 Rendah	6.25	6.25
		3 Sedang	6.25	18.75
		5 Tinggi	6.25	31.25
		5 Tinggi	6.25	31.25
4	Status Hunian	1 Rendah	3.75	3.75
		3 Sedang	3.75	11.25
		1 Rendah	3.75	3.75
		3 Sedang	3.75	11.25
5	Fungsional	5 Tinggi	6.25	31.25
		5 Tinggi	6.25	31.25
		5 Tinggi	6.25	31.25
		5 Tinggi	6.25	31.25
				344.5

**Tabel 4.15**

No.	Variabel	Kategori	Bobot Hasil Penilaian	Nilai Tertimbang
1	Aspek Fisik	5 Tinggi	4	20
		3 Sedang	4	12
		3 Sedang	6	18
		3 Sedang	6	18
2	Aspek Sosial	5 Tinggi	6	30
		3 Sedang	6	18
		3 Sedang	4	12
		3 Sedang	4	12

3	Aspek Kependudukan	3	Sedang	2	6
		3	Sedang	3	9
		3	Sedang	3	9
		1	Rendah	2	2
4	Aspek Sarana	3	Sedang	6	18
		1	Rendah	4	4
		1	Rendah	4	4
		1	Rendah	6	6
5	Aspek Prasarana	1	Rendah	6	6
		1	Rendah	6	6
		1	Rendah	4	4
		1	Rendah	4	4
6	Aspek Tapak	3	Sedang	3	9
		3	Sedang	3	9
		3	Sedang	2	6
		1	Rendah	2	2
					244

**Nilai Tertimbang Masing-Masing Indikator  
Faktor Gaya Sentripetal**

Berdasarkan Analisis pembobotan terkait indikator dan variabel dari faktor gaya sentrifugal dan gaya sentripetal terhadap penggunaan lahan dikawasan Danau Tempe, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor gaya sentrifugal, karena tingkat pengaruh gaya sentrifugal lebih besar dibanding gaya sentripetal.

**G. Analisis SWOT**

Pemecahan masalah di wilayah kawasan danau Tempe dilakukan dengan metode metode analisis secara deskriptif . Analisis deskriptif dilskukan dengan mengetahui dan mengembangkan berbagai strategi dalam upaya merumuskan kebijakan program yang lebih terarah dan terinci. Dalam hal ini perlu adanya pengkajian dan analisis terhadap semua aspek yang mempengaruhi pengembangan kawasan

berdasarkan kondisi masa lalu dan kecenderungan- kecenderungan yang terjadi saat ini. Teknik analisa deskriptif yang digunakan dalam studi ini adalah Analisis SWOT.

Strategi yang tepat di dasarkan pada kemampuan menemukenali diri dan lingkungannya sehingga strategi ini dapat terwujud dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan menangkap peluang yang dihadapinya. Hasil analisis deskriptif dari data sekunder yang bersumber dari kepustakaan yang diperoleh, maka ditemukan beberapa unsure kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam studi ini. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat uraian sebagai berikut ini.

- Kekuatan (strengths)

Kekuatan kawasan Danau Tempe yang dimiliki adalah sebagai produsen atau sumber utama ikan, air tawar sehingga menjadi penyerap tenaga kerja bagi masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Wajo, tapi juga masyarakat di Kabupaten tetangga Kabupaten Soppeng dan Sidrap; memiliki fungsi hidrologi yang vital yakni sebagai penyerapan dan penampung luapan DAS

(Welanae dan Bila) dan pada musim kemarau, penggiran Danau berubah fungsi menjadi lahan pertanian palawija (jagung dan kedelai) yang sangat potensial, khususnya di Kabupaten Wajo, menjadi objek wisata air karena panoram yang indah sehingga

pengembangan pariwisata bias dilakukan karena memiliki keunggulan relative industri pariwisata dari pasar dan pesaing sejenis.

- Kelemahan (weaknesses)

Kelemahan Danau Tempe sebagai Kawasan Pariwisata adalah keterbatasan sumber daya alam (air) karena telah terjadi sedimentasi sehingga pada saat musim kemarau ada bagian dari dasar danau yang mengalami pendangkalan yang bias menghambat perjalanan wisata air, keterampilan dan kemampuan pengelolaan industry pariwisata masih rendah.

- Peluang (opportunities)

Peluang kawasan Danau Tempe dalam pengembangan pariwisata adalah situasi/ kecenderungan utama yang dimiliki wisatawan yang menginginkan berbagai variasi wisata alam sehingga menguntungkan industri pariwisata alam, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber dana bagi peningkatan program pembangunan daerah.

- Ancaman (threats)

Situasi/kecenderungan utama yang bias menjadi faktor tidak menguntungkan Kawasan Danau Tempe dalam pengembangan pariwisata adalah kecenderungan masyarakat yang berdomisili di Kawasan Danau Tempe yang kurang peduli terhadap lingkungan alam,



dan aktifitas penebangan kayu hutan di daerah hulu (Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap) yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan sehingga terjadi sedimentasi dan menjaadi ancaman bagi pengembangan industry pariwisata.

Analisis faktor internal dan eksternal tersebut diatas didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan unsure-unsur kekuatan guna merebut peluang yang ada, namun secara simultan meminimalkan kelemahan dengan menghadapi ancaman atau kendala yang ada. Proses pengambilan keputusan strategi lebih di kenal dengan analisis SWOT dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang bersifat strategis sesuai kondisi saat ini.

#### 1. Penyusunan Analisis SWOT

Tahapan Analisis SWOT adalah mengidentifikasi semua faktor-faktor internal dan eksternal yang bersifat strategi. Model-model yang digunakan dalam analisi SWOT adalah sebagai berikut:

a. IFAS – EFAS (internal – eksternal strategic factor analysis summary)

## b. Matrik SWOT

### 2. Analisis Faktor-Faktor Strategi Internal Eksternal (IFAS – EFAS)

Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengolahan faktor-faktor strategi pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis. Pengguna metode-metode kuantitatif dilakukan untuk membuat peramalan (forecasting) dan asumsi-asumsi secara internal guna menyusun dan merumuskan strategi yang diperlukan. Hasil analisis sementara dari berbagai sumber keputusan dalam studi ini ditemukan beberapa unsure kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan menjadi landasan untuk penyusunan IFAS dan EFAS.

#### a. Penyusunan Tabel IFAS

Analisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui kemungkinan kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi pengembangan penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe yang akan datang. Langkah-langkah penyusunan table IFAS dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 4.16**  
**Model Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)**

<b>Faktor-Faktor Strategis</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kekuatan:</b>				
1. Produsen atau sumber utamakan air tawar.	0,30	4	1,20	Penting
2. Fungsi hidrologi yang vital	0,15	4	0,60	Sedang
3. Sumber daya lahan penanaman palawija (jagund dan kedelai) pada musim kemarau.	0,25	3	0,75	Penting
<b>Jumlah</b>	<b>0,70</b>	-	<b>2,25</b>	-
<b>Kelemahan:</b>				
1. Air surut pada musim kemarau	0,20	3	0,60	Sedang
2. Keterampilan dan kemampuan mengelola pariwisata rendah	0,10	4	0,40	Sedang
<b>Jumlah</b>	<b>0,30</b>	-	<b>1,20</b>	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai faktor strategis kekuatan sebesar 2.25 dengan bobot 0,70 adalah “penting” untuk dipertimbangkan sebagai faktor strategis yang bisa menjadi strategi dalam memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengatasi ancaman yang ada. Sedangkan nilai faktor strategis kelemahan sebesar 1,20 dengan bobot 0,30 adalah “kurang penting” untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang bisa menjadi

ancaman dalam penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe dan pengembangan pariwisata.

b. Penyusunan Tabel EFAS

Analisis lingkungan eksternal (EFAS) dimaksudkan untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi Penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe dan pengembangan pariwisata yang akan datang. Langkah-langkah penyusunan tabel Model Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.17**  
**Model Analisis Faktor Strategi Eksternal**  
**(EFAS)**

<b>Faktor-Faktor Strategis</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Peluang:</b> 1. Kecenderungan wisatawan memilih ekowisata.	0,60	4	2,40	Penting

2. Sumber daya PAD yang potensial untuk mendukung pembanguana daerah.	0,05	3	0,15	Kurang Penting
<b>Jumlah</b>	<b>0,65</b>	<b>-</b>	<b>2,25</b>	<b>-</b>
<b>Kelemahan:</b>				
1. Rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di kawasan Danau Tempe.	0,25	4	1,00	Sedang
2. Belum ada kerjasama interaktif antara Kabupaten Wajo, Soppeng dan Sidrap dalam menjaga kelestarian lingkungan.	0,10	4	0,40	Sedang
<b>Jumlah</b>	<b>0,35</b>	<b>-</b>	<b>1,40</b>	<b>-</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai faktor strategis peluang sebesar 2.55 dengan bobot 0,65 adalah “penting” untuk dipertimbangkan sebagai faktor strategis yang bisa menjadi strategi dalam memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan nilai faktor strategis ancaman sebesar 1,40 dengan bobot 0,35 adalah “moderat” untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang bisa menghambat dalam penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe dan pengembangan pariwisata. Matriks hasil analisis IFAS-EFAS menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pengembangan ekowisata air Danau Tempe disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada seperti terlihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.18.**  
**Matriks Analisis SWOT Penggunaan Lahan di**

<i>Internal</i>	<b>Strengths (S) (Kekuatan)</b>	<b>WEAKNESSES (W) (Kelemahan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Air surut pada musim kemarau.</li> <li>▪ Keterampilan dan</li> </ul>
-----------------	---------------------------------	---

**Kawasan Danau Tempe**

<p><b>Eksternal</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produsen atau sumber utama ikan air tawar Danau Tempe</li> <li>▪ Potensi pengembangan kegiatan perikanan di kawasan Danau Tempe.</li> <li>▪ Fungsi hidrologi yang vital.</li> <li>▪ Lahan penanaman palawija (jagung dan kedelai) yang potensial pada musim kemarau.</li> </ul>	<p>pengelolaan pariwisata rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Danau Tempe bagian Kabupaten Wajo merupakan daerah hilir sehingga pendangkalan muda terjadi.</li> <li>▪ Kondisi jalan penghubung antara ibu kota Kabupaten menuju Kecamatan yang kurang baik.</li> </ul>
<p><b>OPPORTUNITIES (O) (Peluang)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aksesibilitas yang cukup baik di kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo.</li> <li>▪ Kecenderungan wisatawan memilih wisata air (tirta/air).</li> <li>▪ Sumber PAD yang potensial.</li> <li>▪ Tumbuh dan berkembangnya sarana dan prasarana di kawasan Danau Tempe.</li> <li>▪ Sumber perekonomian masyarakat yang potensial.</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengelolaan lingkungan wisata tirta berbasis lingkungan akan menarik kunjungan wisatawan sehingga bisa menambah PAD.</li> <li>○ Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan meningkatnya fungsi hidrologi dan penggunaan lahan di kawasan Danau Tempe Kabupaten Wajo.</li> <li>○ Memancing investor lokal dan luar daerah untuk mengembangkan potensi perikanan di kawasan Danau Tempe.</li> </ul>	<p><b>STRATEGI W-O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penggunaan lahan melalui program reguler penanaman jagung dan kedelai pada musim kemarau.</li> <li>○ Kerjasama program dengan instansi yang terkait (Dispar, Distan, Disbun, PU dan Pengairan dalam Pengelolaan Danau Tempe)</li> <li>○ Perlu adanya penataan permukiman yang baik di kawasan Danau Tempe.</li> </ul>

<p><b>TREATHS (T) (Ancaman)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ancaman bencana banjir pada musim hujan di kawasan Danau Tempe.</li> <li>▪ Rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di kawasan Danau Tempe.</li> <li>▪ Belum ada kerjasama yang interaktif antara Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap dalam menjaga kelestarian lingkungan.</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Intensifikasi kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan wisata tirta berbasis lingkungan.</li> <li>○ Menjalin hubungan inter koneksitas dengan kabupaten tetangga (Kabupaten Soppeng dan kabupaten Sidrap) melalui kerjasama untuk menjaga lingkungan Danau Tempe .</li> <li>○ Pembuatan AMDAL, kawasan rawan bencana, kawasan budidaya serta kawasan lindung.</li> </ul>	<p><b>STRATEGI W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelatihan dan pendampingan masyarakat pengelolaan Danau Tempe Berbasis lingkungan .</li> <li>○ Membangun program kemitraan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap sebagai daerah hulu dalam menjaga kelestarian lingkungan.</li> </ul>
--	---	---

- Strategi S-O

1. Langkah strategi ini mengacu pengelolaan lingkungan wisata tirta berbasis lingkungan sehingga akan lebih menarik dan menambah kunjungan wisatawan ke Danau Tempe sehingga dapat menambah PAD. Dengan demikian, maka pengembangan pariwisata bisa berjalan dengan baik.

2. Meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat dengan meningkatnya fungsi hidrologi dan penggunaan lahan pertanian di Kawasan Danau Tempe. Dengan meningkatnya fungsi hidrologi Danau Tempe sebagai daerah penyanggah air dari dua sumber DAS (Bila dan Walanae) maka aktifitas pengelolaan pada musim kemarau di Kawasan Danau Tempe



akan lebih meningkat. Dengan demikian, perekonomian masyarakat akan ikut lebih berkembang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sebagai sumber PAD ikut meningkat.

- Strategi S-T

1. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Praswil) dan meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan wisata berbasis lingkungan. Dinas Pariwisata sebagai instansi yang terkait langsung dengan pengembangan daerah wisata harus menjamin kerjasama dengan instansi teknis terkait dengan usaha dalam membembangkan wisata Danau Tempe.

2. Menjalin hubungan interkoneksi dengan Kabupaten tetangga (Soppeng dan Sidrap) melalui kerjasama untuk menjaga lingkungan Danau Tempe. Kerjasama dengan Kabupaten tetangga perlu dilakukan secara intensif dan integratif guna menjaga kelastarian Danau Tempe sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat yang optimal dari Danau tersebut. Dengan Demikian akan membantu dalam mengurangi hambatan dalam pengembangan penggunaan lahan di Kawasan Danau Tempe dan pengembangan pariwisata.

- Strategi W-O

1. Penggunaan lahan melalui program reguler penanaman jagung dan kedelai pada setiap musim kemarau. Penanaman jagung pada musim kemarau membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan aktifitas ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki sehingga terbangun kebersamaan untuk ikut bertanggung-jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan Danau Tempe.

2. Kerjasama program dengan instansi terkait (Dinas PU, Pengairan dan Praswil) Kabupaten dalam mengelola Danau Tempe. Program kerjasama dengan instansi terkait akan membantu pengembangan pariwisata tirta Danau Tempe sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Wajo.

- Strategi W-T

1. Pelatihan dan pendampingan masyarakat mengelola Danau Tempe berbasis lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi/badan pemerintah terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan lainnya.

BPMD sebagai leading sektor dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang lebih dikenal dengan PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi masyarakat perdesaan , khususnya yang tergolong

miskin dan aksesibilitas terbatas. Program pemberdayaan masyarakat ini menerapkan pendekatan berbasis kelompok yang didampingi oleh fasilitator ditingkat Kecamatan dan tenaga pendamping di Desa. PNPM-Mandiri perdesaan melaksanakan sesuai dengan tahapan program reguler yang dilaksanakan dinas/instansi pemerintah lainnya sehingga pelaksanaan program bisa saling terkait dan terpadu. Misalnya, usulan masyarakat yang tidak terakomodasi pada Musrenbang akan diikuti berkompetisi pada Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa PNPM-Mandiri Perdesaan. Pelaksanaan usulan kegiatan yang didanai PNPM-Mandiri Perdesaan akan difasilitasi oleh tenaga

pendamping Desa. Tenaga ini akan mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi pemerintah yang terkait. Misalnya kegiatan pengembangan ternak, tanaman buah-buahan dan tanaman hijau untuk ternak kawasan hutan produksi terbatas, maka tenaga pendamping masyarakat akan melibatkan tenaga penyuluh (PPL) dari Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. Dalam pelaksanaan program tidak hanya pendampingan, tapi juga disertai dengan pelatihan masyarakat. Dalam pelatihan ini, materi yang harus ditekankan adalah pengelolaan Penggunaan Lahan secara berkelanjutan dan bewawasan lingkungan.

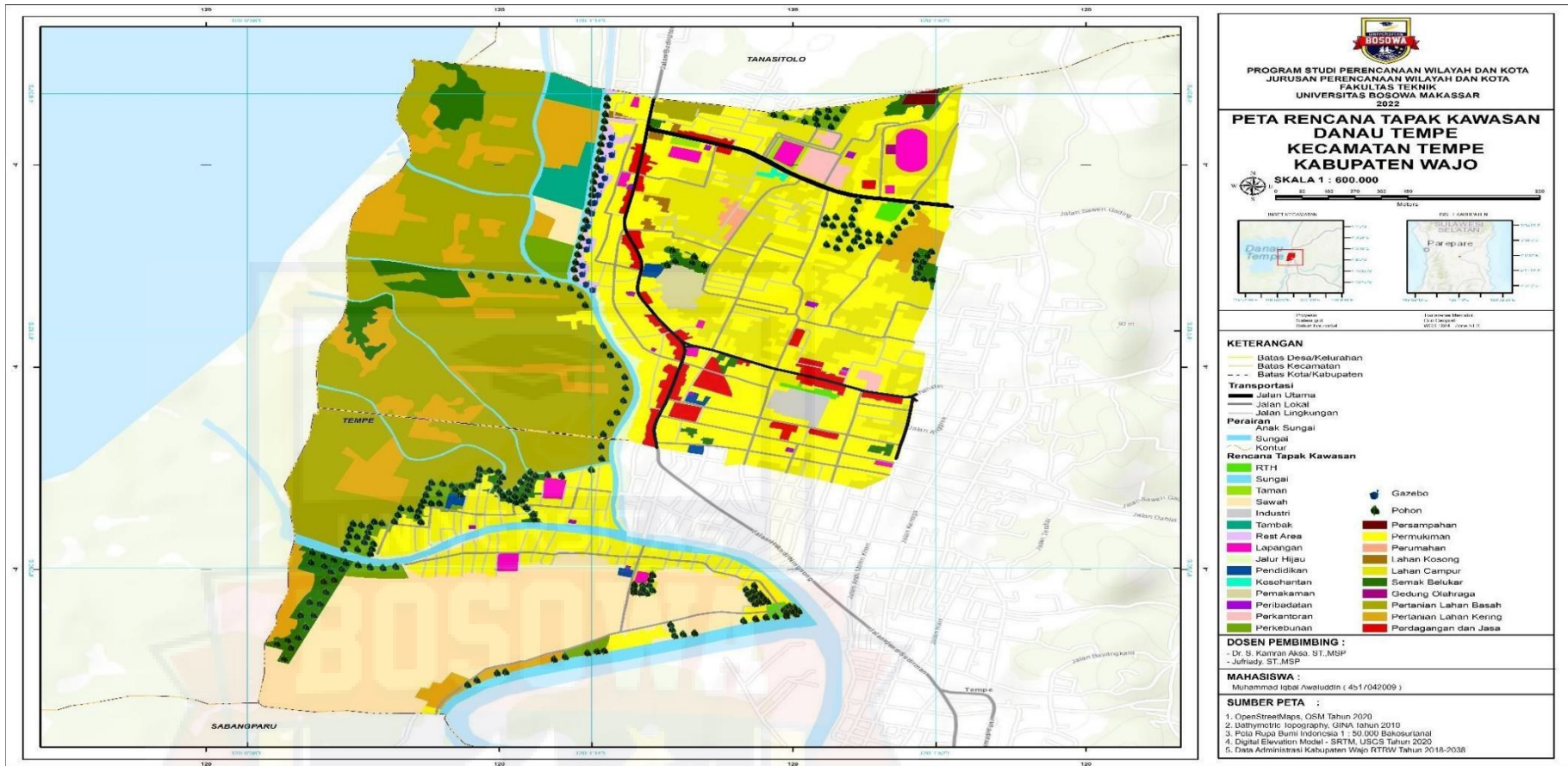
2. Membangun program kemitraan dengan Kabupaten tetangga (Soppeng dan Sidrap) sebagai daerah hulu dalam menjaga kelestarian

lingkungan Danau Tempe di Kabupaten Wajo sebagai daerah hilir. Program kemitraan dalam menjaga lingkungan Danau Tempe sebagai daerah hilir sudah harus mendapatkan perhatian serius dan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Wajo karena daerah hilirlah yang mendapatkan dampak negative yang langsung dan paling besar. Ketika tingkat kerusakan belum nampak dan terasa akibatnya, maka Danau Tempe baik di Kabupaten Soppeng maupun di Kabupaten Wajo dikenal sebagai penghasil ikan air tawar terbesar sampe pada akhir tahun 1980-an, tetapi kini produksi ikannya sangat menurun drastic akibat dari sedimentasi. Dengan demikian, maka perlu dilakukan program kerjasama mengelola lingkungan daerah hulu Danau Tempe agar fungsi Danau sebagai sumber penghasilan masyarakat dari produksi ikan dan sumber pengairan tetap bisa terjaga dan berkelanjutan serta menjadi salah satu tempat wisata tirta yang menarik karena pengelolaannya berwawasan lingkungan.





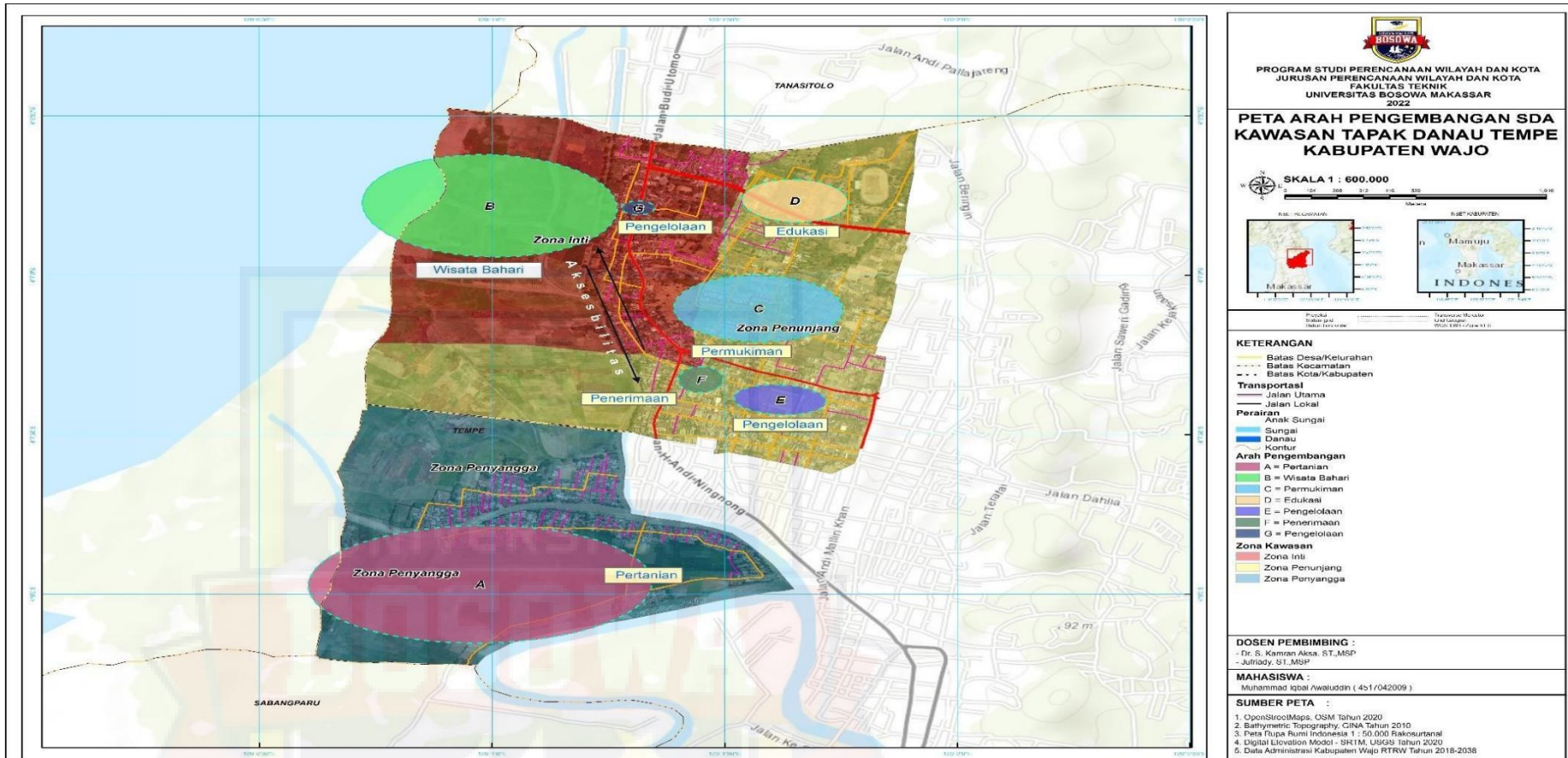
Gambar 4.15  
Peta Tapak Kawasan pesisir





Gambar 4.16

Peta Konsep Pengembangan Kawasan pesisir





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan tentang strategi pengembangan kawasan pesisir dengan pengelolaan berkelanjutan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yaitu :

1. Pengelolaan SDA pesisir berbasis pada perlindungan potensi pesisir
2. Pengendalian pemanfaatan SDA pesisir secara berkelanjutan  
Menjadikan potensi SDA pesisir untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
3. Implementasi kebijakan di dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan
4. Mengarahkan pengelolaan potensi SDA pesisir dengan mengutamakan pengelolaan pada aspek lingkungan pemanfaatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat pesisir
5. Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan SDA pesisir
6. Diperlukan upaya pengelolaan dengan promosi potensi SDA
7. Diperlukannya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wilayah

pesisir

8. Meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pengelolaan SDA

peisisir

## **B.Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah, antara lain :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo meliputi :
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada di Kecamatan Tempe secara berkelanjutan.
  - b. Pemerintah dituntut untuk terus memperhatikan dan mengadakan pemeliharaan pada sumber daya pesisir yang ada di Kecamatan Tempe.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Tempe, khususnya yang berada pada kawasan pesisir agar lebih memperhatikan aspek ekologis agar keseimbangan lingkungan dan kealamian alam tetap terpelihara sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya pesisir yang ada di kawasan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syaiful. 2014. Pengelolaan Kawasan Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, (Media Online: <https://pengelolaan-kawasan-pesisir-secara-terpadu-dan-berkelanjutan-berbasis-masyarakat-dipertasby.html>. 2014) diakses pada 10 April 2016
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tengah. 2005. Rencana Pengelolaan Propinsi Sulawesi Tengah Kawasan “*Marine and Costal Management Are (MCMA)*”. Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Sulawesi Tengah
- Basuki dan Djunaedi. 2002. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol 3, No 3, September 2002: 225-231
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo dalam angka 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo dalam angka 2021
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Wajo dalam angka 2019
- Buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Wajo 2022
- Bengen, D. 2009, *Pentingnya Keterpaduan dalam Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan*. IPB

- Bryant, C. dan L.G. White. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES, Jakarta
- Dahuri, R. 1996. *Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan, makalah Seminar Sehari Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. PPLH-IPB, Ditjen Bangda dan ABD. Bogor, April
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.K. Sitepu, 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Dahuri, Rokhmin. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Depry Nur Annisa Ahmad. 2014. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Tepian Air (Waterfont) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

- Jufriadi. 2014. *Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta
- Muis, La Sara, Dasmin Sidu, 2010. *Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Abeli Kota Kendari*. Kendari
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE): Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nadjib, M. 1998. *Adaptasi Ekonomi Masyarakat Nelayan: Alternatif dan Ketidakpastian Lingkungan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, JEP VI No.2, hal 61-74*
- Nurani, Neni. 2012. *Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, (Media Online: <https://pelajar-mahasiswa-rangkuman-materi-kuliah-pemanfaatan-pengelolaan-wilayah-pesisir.html>). 2012) diakses pada 10 April 2016
- Patria, Andreas D. 1999. *Analisis Kebijakan Pengembangan Parawisata Pesisir Dengan Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Kasus di Pesisir Utara Pulau Bintan Kepulauan Riau)*. Tesis Magister Sains. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012- 2031.

Rahmat Hidayat, 2014. *Studi Pengembangan Kawasan Wisata Taman Purbakala Gojeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*. Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suparmoko. M, 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta.

Tabau, Nurhan. 2011. *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu (Studi Kebijakan dan Analisis*

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Iqbal Awaluddin adalah penulis skripsi ini. Lahir di Ujungpandang pada tanggal 16 Maret 1998. Penulis merupakan Anak Kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Awaluddin Sibe SKM.M.Kes dan Ir Syamsuriani S.P.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 3 Wajo pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 6 Wajo dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Wajo dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Bosowa Makassar Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia perencanaan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo”**.